



Katalog BPS : 4102004.3674
ISSN : 2089-4619

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2014

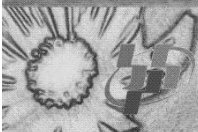


Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan



Katalog BPS : 4102004.3674
ISSN : 2089-4619

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2014



Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KOTA TANGERANG SELATAN

2014

ISSN : 2089-4619

Katalog BPS : 4102004.3674

Ukuran Buku : 25 cm x 17,6 cm

Jumlah Halaman : x + 76 Halaman / *pages*

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan

Gambar:

Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan

Dicetak oleh:

”Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya”

Kata Pengantar Kepala BPS Kota Tangerang Selatan

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas terbitnya publikasi “**Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Tangerang Selatan 2013**”. Publikasi ini merupakan publikasi kedua yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan dan direncanakan akan diterbitkan secara rutin tiap tahunnya. Data yang digunakan bersumber dari BPS, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Sebagian besar data indikator kesejahteraan rakyat bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) keadaan Juli 2013, khusus untuk data ketenagakerjaan bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) keadaan Agustus 2013.

Publikasi ini menyajikan aspek-aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut berbagai bidang yang mencakup kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf kesejahteraan dan pola konsumsi, perumahan, serta sosial lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup. Selain itu juga ditampilkan angka Indikator Pembangunan Manusia berikut komponen penyusunnya.

Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu hingga terbitnya publikasi ini. Kepada para pengguna diharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan publikasi ini pada masa yang akan datang.

Setu, September 2014

Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Tangerang Selatan



Darusman S.Si, MM

NIP. 19720727 199412 1 001

Daftar Isi

Halaman	
Kata Pengantar Kepala BPS Kota Tangerang Selatan	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	ix
I. Kependudukan	1
1.1. Jumlah Penduduk dan Sex Ratio	4
1.2. Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk	5
1.3. Komposisi penduduk	8
II. Kesehatan dan Gizi	15
2.1. Angka Kesakitan dan Lamanya Sakit	17
2.2. Balita yang diberi ASI dan Imunisasi.....	19
2.3. Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan.....	21
III. Pendidikan	29
3.1. Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	31
3.2. Tingkat Pendidikan yang ditamatkan dan Partisipasi Sekolah	33
IV. Ketenagakerjaan	43
4.1. Indikator Ketenagakerjaan	46
4.2. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan.....	49
4.3. Bekerja Menurut Sektor Pekerjaan dan Jam Kerja	52
V. Kemiskinan dan Pola Konsumsi	56
VI. Perumahan dan Lingkungan	72
VII. Indeks Pembangunan Manusia	81
7.1 Indikator Kesehatan	84
7.2 Indikator Pengetahuan.....	85
7.2.1. Angka Melek Huruf.....	85
7.2.2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) / Mean Years of Schooling	86

7.2.3. Indeks Pengetahuan (Indeks AMH + Indeks RLS)	87
7.3. Indikator Ekonomi.....	88
7.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	90

<http://tangselkota.bps.go.id>

Daftar Tabel

Halaman

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio di Kota Tangerang Selatan Tahun 2013	3
Tabel 1.2 Kepadatan Penduduk Kota Tangerang Selatan Menurut Kecamatan Tahun 2013.....	7
Tabel 1.3 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Di Kota Tangerang Selatan Tahun 2013	9
Tabel 2.1 Angka Kesakitan dan Rata-rata Lamanya Sakit Penduduk Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 - 2013	17
Tabel 2.2 Persentase Balita yang Pernah diberi ASI dan Imunisasi di Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 - 2013	19
Tabel 2.3 Persentase penolong Kelahiran di Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 – 2013	22
Tabel 2.4 Persentase Penduduk yang Berobat Sendiri Menurut Jenis Obat yang Digunakan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 - 2013	23
Tabel 2.5 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Kota Tangerang Selatan Tahun 2013	25
Tabel 3.1 Angka Melek Huruf (Latin) dan Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin Di Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 - 2013	30
Tabel 3.2 Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 - 2013.....	32
Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012- 2013	34
Tabel 3.4 APM dan APK Kota Tangerang Selatan menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2012 - 2013	36
Tabel 4.1 Indikator Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013.....	44
Tabel 4.2 Komposisi Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin Tahun 2013	47

Tabel 4.3	Komposisi Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin Tahun 2013 (persen)	48
Tabel 4.4	Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu dan Jenis Kelamin Tahun 2012 - 2013	50
Tabel 5.1	Indikator Kemiskinan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2012	54
Tabel 5.2	Indikator Kemiskinan Kabupaten Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2013	55
Tabel 5.3	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Perbulan Penduduk Kota Tangerang Selatan Tahun 2012-2013	61
Tabel 5.4	Persentase Penduduk Menurut Rata-rata Pengeluaran Perkapita Perbulan Kabupaten Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2013	63
Tabel 6.1	Indikator Fasilitas Perumahan Kota Tangerang Selatan, Tahun 2012 - 2013 (Persen)	71
Tabel 7.1	Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM	78
Tabel 7.2	Indeks Komponen Penyusun IPM Kota Tangerang Selatan Tahun 2012-2013	84
Tabel 7.3	Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Komponen IPM dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten 2012-2013	85
Tabel 7.4	Peringkat IPM Secara Nasional Dirinci Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten 2012-2013	87

Daftar Gambar

Halaman

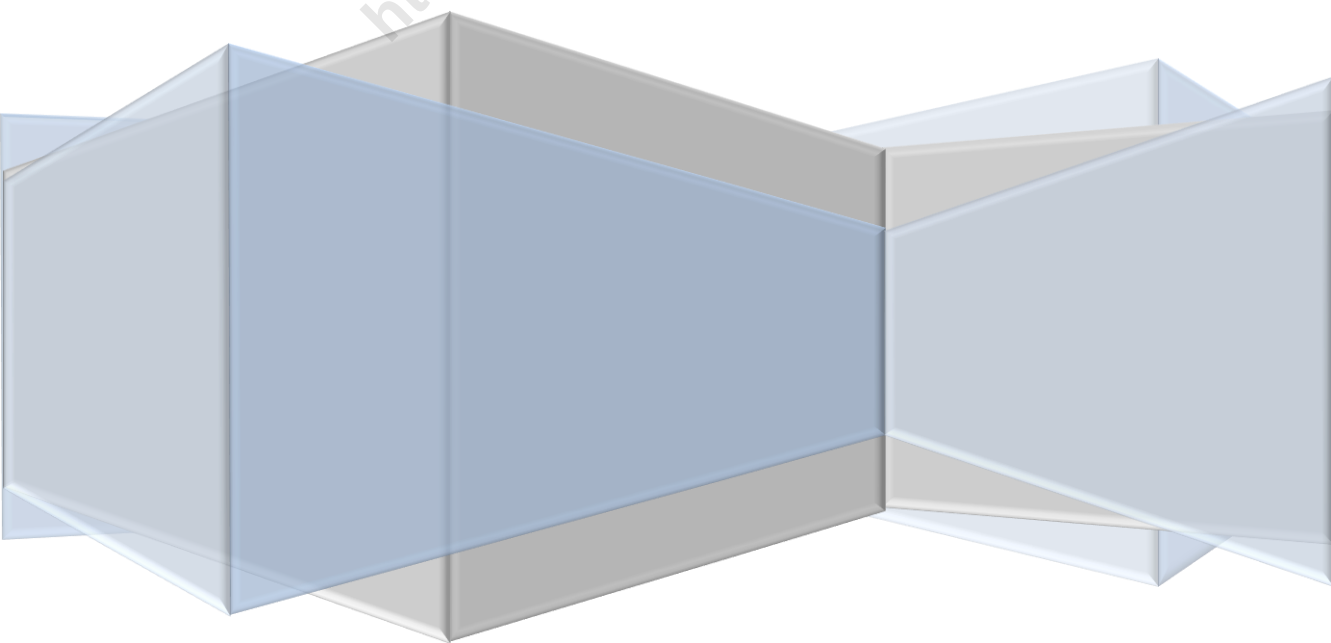
Gambar 1.1. Penduduk Kota Tangerang Selatan Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin 2013.....	11
Gambar 1.2. Piramida Penduduk Kota Tangerang Selatan 2013.....	12
Gambar 1.3. Persentase Penolong Kelahiran di Kota Tangerang Selatan Tahun 2013	21

<http://tangselkota.bps.go.id>

BAB I

KEPENDUDUKAN

<http://teunggaselkota.bps.go.id>



Penduduk merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan, karena permasalahan kependudukan tidak hanya menyangkut kelahiran, kematian dan migrasi, tetapi juga menyangkut masalah sosial budaya, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan yang sangat berpengaruh dalam upaya peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, data kependudukan yang akurat dan tepat waktu sangat dibutuhkan dalam upaya penyelesaian masalah tersebut.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan *Sex Ratio*
di KotaTangerang Selatan Tahun 2013

No	Kecamatan	Penduduk		Total	<i>Sex Ratio</i>
		Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Setu	38.352	36.650	75.002	104,64
2	Serpong	78.007	79.245	157.252	98,44
3	Pamulang	159.014	155.917	314.931	101,99
4	Ciputat	108.225	104.599	212.824	103,47
5	Ciputat Timur	97.453	96.031	193.484	101,48
6	Pondok Aren	172.787	168.629	341.416	102,47
7	Serpong Utara	73.964	74.530	148.494	99,24
Tangerang Selatan		708.767	727.802	715.601	1.443.403

Sumber : Hasil Proyeksi Penduduk 2013

Dalam proses pembangunan, penduduk disamping sebagai pelaksana pembangunan juga merupakan sasaran akhir dari semua target program pembangunan, seperti peningkatan kesejahteraan, kesehatan, keamanan, kualitas sumber daya manusia dan sebagainya. Oleh sebab itu, pembangunan bidang kependudukan perlu dikelola dengan baik sehingga menghasilkan sumber daya manusia berkualitas yang dapat menunjang keberhasilan pembangunan. Karakteristik penduduk menjadi acuan bagi

pemerintah dalam menentukan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan. Begitu juga untuk bahan evaluasi, data mengenai kependudukan dapat dijadikan sebagai dasar untuk menilai sejauh mana keberhasilan dan dampak dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

1.1. Jumlah Penduduk dan Sex Ratio

Pada Tahun 2013, Penduduk Kota Tangerang Selatan berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2013 berjumlah 1.443.403 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 727.802 jiwa dan perempuan 715.601 jiwa. Bila dilihat penyebarannya pada tiap kecamatan, maka Kecamatan Pondok Aren merupakan kecamatan yang paling banyak penduduknya yaitu sebanyak 341.416 jiwa, diikuti Kecamatan Pamulang sebanyak 314.931 jiwa dan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Setu, yaitu sebanyak 75.002 jiwa.

Bila dilihat menurut jenis kelamin, maka jumlah penduduk laki-laki di Kota Tangerang Selatan lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan. Dari Tabel 1.1 terlihat bahwa Angka *sex ratio* penduduk Tangerang Selatan pada tahun 2013 sebesar 101,71. Hal ini menunjukkan bahwa pada setiap 100 orang penduduk perempuan di Tangerang Selatan terdapat kurang lebih 102 orang penduduk laki-laki. Bila diteliti lebih jauh apa yang menyebabkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan, ada beberapa kemungkinan yang dapat menyebabkan kondisi ini terjadi adalah jumlah kelahiran laki-laki lebih besar dari perempuan, penduduk perempuan yang sekolah dan bekerja di luar Tangerang Selatan lebih banyak dari penduduk laki-laki, tingkat kesehatan penduduk perempuan lebih rendah dari penduduk laki-laki dan tingkat migrasi keluar penduduk perempuan lebih besar dari penduduk laki-laki. Mungkin juga para pendatang dari luar daerah Kota Tangerang Selatan lebih

banyak laki-laki dibanding perempuan. Untuk lebih akuratnya diperlukan penelitian yang lebih mendalam.

1.2. Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk

Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu kota dari 8 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten. Kota Tangerang Selatan merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang dan diresmikan sebagai daerah otonom pada tanggal 28 Oktober 2008 dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 51 tahun 2008. Kota Tangerang Selatan merupakan daerah strategis karena berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, berjarak ± 20 kilometer ke ibukota negara dan ± 20 menit dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Batas-batas wilayah administrasi Kota Tangerang Selatan menurut Undang-undang 51 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pinang, Kecamatan Larangan, Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Depok dan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cisauk, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang.

Secara administratif Kota Tangerang Selatan terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Setu, Serpong, Pamulang, Ciputat, Ciputat Timur, Pondok Aren dan Serpong Utara. Kota Tangerang Selatan memiliki luas wilayah 147,19 kilometer persegi. Secara umum Kota Tangerang Selatan merupakan dataran rendah dengan letak ketinggian di atas permukaan laut lebih dari 25 meter.

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah beriklim tropis, temperatur rata-rata berkisar antara 24,5–33,0°C dengan temperatur terendah berkisar 24,0°C. Rata-rata kelembaban udara dan intensitas matahari sekitar 77 persen dan 54 persen. Rata-rata kecepatan angin dalam setahun adalah 2,2 meter perdetik dengan kecepatan maksimum 9 meter perdetik.

Kota Tangerang Selatan terletak di bagian timur Provinsi Banten yang secara geografis terletak pada koordinat :

6° 39' 00" - 6° 47' 00" Lintang Selatan

106° 14' 00" - 106° ' 22" Bujur Timur

Dengan luas wilayah sebesar 147,19 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 1.443.403 jiwa, maka pada tahun 2013 setiap Km² wilayah di Kota Tangerang Selatan rata-rata ditempati oleh 9.806 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Tangerang Selatan merupakan wilayah yang padat penduduknya. Sebagai wilayah perkotaan dengan letak yang cukup strategis, ditambah tersedianya berbagai fasilitas umum baik di bidang transportasi, kesehatan, pendidikan, perdagangan dan jasa menjadikan Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu daerah tujuan urbanisasi penduduk dari wilayah lain.

Bila dilihat menurut luas wilayah maka Kecamatan Pondok Aren merupakan kecamatan yang paling luas wilayahnya, yaitu 29,88 Km². Berikutnya diikuti oleh Kecamatan Pamulang dan Kecamatan Serpong dengan luas wilayah masing-masing sebesar 26,82 Km² dan 24,04 Km². Sedangkan dua kecamatan yang paling kecil luasnya adalah Kecamatan Setu dan Kecamatan Ciputat Timur, masing-masing sebesar 14,80 Km² dan 15,43 Km². Menurut asal terbentuknya Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Setu merupakan Kecamatan pecahan Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang.

Sedangkan Kecamatan Ciputat Timur merupakan Kecamatan bentukan baru pecahan dari Kecamatan Ciputat.

Tabel 1.2
Kepadatan Penduduk KotaTangerang Selatan
Menurut Kecamatan Tahun 2013

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Setu	14,80	75.002	5.068
2	Serpong	24,04	157.252	6.541
3	Pamulang	26,82	314.931	11.742
4	Ciputat	18,38	212.824	11.579
5	Ciputat Timur	15,43	193.484	12.539
6	Pondok Aren	29,88	341.416	11.426
7	Serpong Utara	17,84	148.494	8.324
Tangerang Selatan		147,19	147,19	1.443.403

Sumber: Hasil Proyeksi Penduduk 2013

Apabila dilihat dari kepadatan penduduknya, ada 4 Kecamatan yang penduduknya cukup padat, dimana tiap Km² dihuni sekitar 12 ribuan jiwa, yang terpadat ada di Kecamatan Ciputat Timur sebanyak 12.539 jiwa/Km². Kemudian diikuti oleh Kecamatan Pamulang sebanyak 11.742 jiwa/Km², Kecamatan Ciputat sebanyak 11.579 jiwa/Km² dan Kecamatan Pondok Aren sebanyak 11.426 jiwa/Km². Keempat kecamatan tersebut merupakan wilayah yang letaknya berada di sekitar pusat pemerintahan Kota Tangerang Selatan. Sedangkan Kecamatan yang kurang padat penduduknya adalah Kecamatan Setu, Kecamatan Serpong dan Kecamatan Serpong Utara dengan kepadatan penduduk masing-masing sebesar 5.068 jiwa/Km², 6.541 jiwa/Km² dan 8.324 jiwa/Km². Ketiga kecamatan ini terletak di bagian barat

Kota Tangerang Selatan dan berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.

1.3. Komposisi Penduduk

Penduduk suatu wilayah dikategorikan penduduk muda bila median umur kurang dari 20 tahun, penduduk menengah jika median umur 20–30 tahun, dan penduduk tua jika median lebih dari 30 tahun. Pada tahun 2013 median umur penduduk Kota Tangerang Selatan adalah 25,64 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk di Kota Tangerang Selatan termasuk kategori penduduk menengah.

Situasi kependudukan suatu wilayah selain digambarkan melalui kepadatan penduduk dan rasio jenis kelaminnya, juga dapat tercermin dari komposisi penduduk menurut kelompok umurnya. Menurut Tabel 1.3, di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2013 terdapat 370.851 jiwa atau 25,69 persen penduduk yang termasuk usia belum produktif secara ekonomi, yaitu penduduk berumur 0-14 tahun. Pada kelompok usia 0-14 tahun ini, penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 104,67. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk perempuan usia 0-14 tahun terdapat sekitar 104 penduduk laki-laki pada kelompok usia yang sama.

Sedangkan untuk penduduk kelompok umur produktif, yaitu penduduk berumur 15-64 tahun berjumlah 1.034.216 jiwa atau 71,65 persen, dengan rasio jenis kelamin sebesar 101,17. Pada kelompok umur penduduk yang dianggap tidak produktif lagi, yaitu penduduk berumur 65 tahun keatas terdapat sejumlah 38.336 jiwa atau 2,66 persen. Berbeda dengan kelompok umur 0-14 tahun dimana laki-laki lebih banyak dibanding perempuan, untuk kelompok usia tua (65 tahun keatas), penduduk perempuan lebih banyak dibanding laki-laki dengan rasio jenis kelamin

sebesar 88,93 yang berarti bahwa dari 100 penduduk perempuan usia tua terdapat sekitar 89 penduduk laki-laki untuk kelompok usia yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa angka harapan hidup penduduk perempuan untuk kelompok usia tua lebih tinggi dibanding laki-laki. Diduga karena peranan laki-laki sebagai penanggung jawab pencari nafkah dalam keluarga mungkin salah satu penyebabnya sehingga laki-laki mempunyai resiko kematian yang lebih tinggi daripada perempuan.

Tabel 1.3
Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur
di Kota Tangerang Selatan Tahun 2013

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 – 4	71.177	9,78	68.199	9,53	139.376	9,66
5 – 9	63.120	8,67	60.091	8,40	123.211	8,54
10 – 14	55.355	7,61	52.909	7,39	108.264	7,50
15 – 19	59.135	8,13	62.174	8,69	121.309	8,40
20 – 24	64.453	8,86	66.772	9,33	131.225	9,09
25 – 29	69.686	9,57	71.993	10,06	141.679	9,82
30 - 34	70.982	9,75	72.486	10,13	143.468	9,94
35 – 39	66.839	9,18	66.848	9,34	133.687	9,26
40 – 44	60.025	8,25	57.382	8,02	117.407	8,13
45 – 49	48.912	6,72	47.022	9,57	95.934	6,65
50 – 54	37.293	5,12	34.440	4,81	71.733	4,97
55 – 59	27.737	3,81	23.126	3,23	50.863	3,52
60 – 64	15.043	2,07	11.868	1,66	26.911	1,86
65 – 69	8.684	1,19	8.568	1,20	17.252	1,20
70 – 74	4.903	0,67	5.327	0,74	10.230	0,71
75 +	4.458	0,61	6.396	0,89	10.854	0,75
JUMLAH	727.802	100	715.601	100	1.443.403	100

Sumber : Hasil Proyeksi Penduduk 2013

Berdasarkan komposisi penduduk menurut kelompok umur seperti yang disajikan pada Tabel 1.3, dapat diturunkan indikator kependudukan terkait potensi ekonomi ketenagakerjaan, yaitu Angka Beban Tanggungan

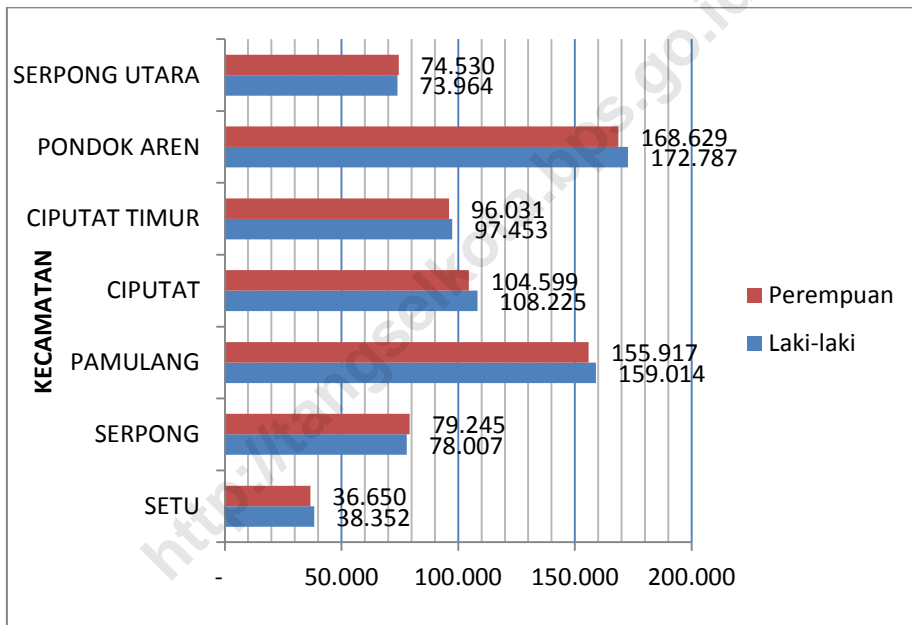
(*Dependency Ratio*). Angka Beban Tanggungan merupakan perbandingan antara penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) dan usia tua (65 tahun keatas) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun). Besaran nilai indikator ini menunjukkan beban tanggungan ekonomi penduduk usia produktif. Semakin kecil Angka Beban Tanggungan dapat menunjukkan potensi ekonomi masyarakat yang semakin baik karena akan semakin sedikit beban yang ditanggung penduduk usia produktif. Sebaliknya, semakin besar Angka Beban Tanggungan dapat menghambat akselerasi pembangunan, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas SDM baik secara individu maupun kolektif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengurangi besarnya angka beban tanggungan adalah dengan menekan angka kelahiran (*fertilitas*) dan menghindari usia perkawinan muda.

Pada tahun 2013, Angka Beban Tanggungan di Kota Tangerang Selatan sebesar 39,56 persen. Dengan kata lain setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 39 orang penduduk usia tidak produktif. Bila dibandingkan dengan Angka Beban Tanggungan Provinsi Banten yaitu sebesar 47,08 persen, maka Angka Beban Tanggungan Kota Tangerang Selatan masih lebih baik karena beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif lebih sedikit. Namun hal ini tidak berarti bahkan bisa menjadi masalah apabila tidak dimanfaatkan. Dengan menyediakan lapangan kerja baru yang bisa menyerap tenaga kerja produktif sehingga bisa meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat.

Dari Gambar 1.1 terlihat bahwa distribusi penduduk di Kota Tangerang Selatan bervariasi antar kecamatan. Jumlah penduduk terbesar Kota Tangerang Selatan terdapat di Kecamatan Pondok Aren, yaitu meliputi 23,65 persen dari total jumlah penduduk. Kemudian diikuti oleh Kecamatan

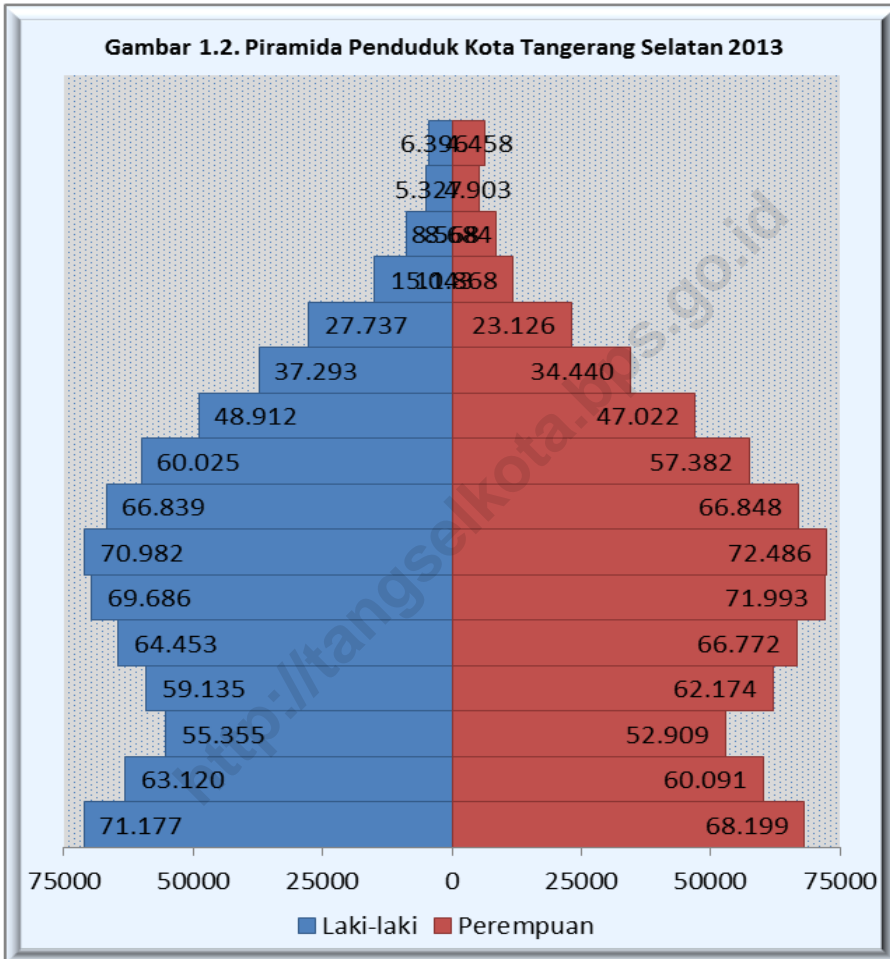
Pamulang sebesar 21,82 persen dan Kecamatan Ciputat sebesar 14,74 persen. Kecamatan Setu dan Kecamatan Serpong Utara merupakan kecamatan dengan jumlah proporsi penduduk paling sedikit yaitu masing-masing sebesar 5,20 persen dan 10,89 persen.

Gambar 1.1 Penduduk Kota Tangerang Selatan Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin 2013



Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, terdapat lima kecamatan dengan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Pengecualian untuk Kecamatan Serpong dan Kecamatan Serpong Utara. Pada Kecamatan Serpong, penduduk laki-laki berjumlah 78.007 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 79.245 jiwa, dengan angka rasio jenis kelamin sebesar 98,44. Artinya dari 100 penduduk perempuan ada sekitar 98 penduduk laki-laki. Sedangkan diKecamatan Serpong Utara penduduk laki-laki berjumlah 73.964 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 74.530 dengan rasio jenis kelamin sebesar 99,24 yang berarti

bahwa dari 100 penduduk perempuan di Kecamatan Serpong Utara ada sekitar sekitar 99 penduduk laki-laki.



Situasi penduduk menurut kelompok umur juga bisa digambarkan melalui Piramida penduduk. Piramida penduduk adalah dua buah diagram batang berbeda sisi dimana satu sisi menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan pada satu sisi lainnya menunjukkan jumlah penduduk perempuan dalam kelompok interval usia lima tahunan. Piramida penduduk menggambarkan perkembangan penduduk dalam kurun waktu tertentu. Negara atau daerah dengan angka kematian bayi yang rendah dan memiliki usia harapan hidup

tinggi, bentuk piramida penduduknya hampir menyerupai kotak, karena mayoritas penduduknya hidup hingga usia tua.

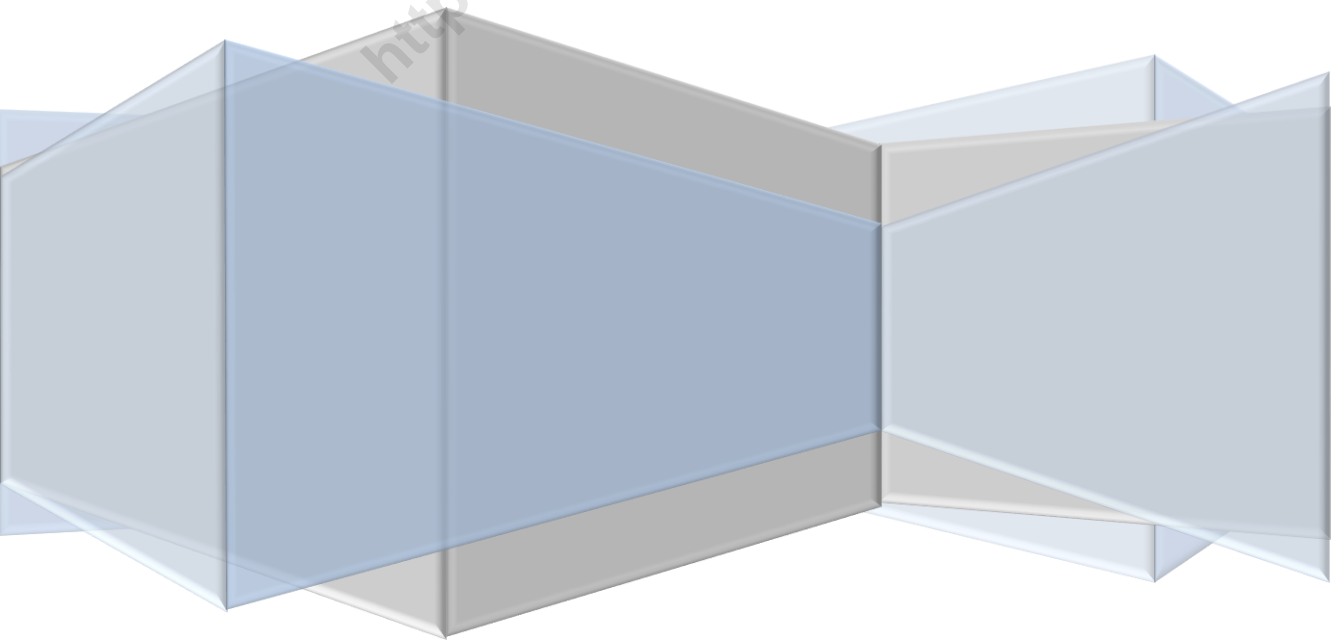
Sebaliknya yang memiliki angka kematian bayi tinggi dan usia harapan hidup rendah, piramida penduduknya berbentuk menyerupai genta (lebar di tengah), yang menggambarkan tingginya angka kematian bayi dan tingginya risiko kematian.

Bila dilihat dari bentuknya, piramida penduduk di Kota Tangerang Selatan sudah tidak berbentuk Limas tetapi sudah mengarah berbentuk seperti Granat/Stationer. Penduduk yang berada pada kelompok umur 5-9 tahun sudah mulai berkurang karena penurunan jumlah kelahiran selama 10 tahun yang lalu. Demikian juga untuk kelompok umur 10-14 tahun dan kelompok umur 15-19 tahun. Penduduk yang paling banyak ada di kelompok umur 30-34 tahun dan 25-29 tahun, yaitu masing-masing sebesar 9,94 persen dan 9,82 persen dari total penduduk. Sedangkan penduduk usia lanjut (kelompok umur 65 tahun keatas) berjumlah 38.336 jiwa atau hanya sebesar 2,66 persen. Hal ini menunjukkan tingginya persentase penduduk usia produktif di Kota Tangerang Selatan. Kelompok penduduk ini akan menjadi potensi ekonomi pada masa depan apabila dibekali dengan pengetahuan dan keahlian.

BAB II

KESEHATAN DAN GIZI

<http://tangselkota.bps.go.id>



Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sudah banyak dilakukan oleh pemerintah melalui penyediaan berbagai fasilitas kesehatan umum seperti puskesmas/pustu, poskesdes, polindes, pondok bersalin desa, posyandu serta penyediaan fasilitas air bersih.

2.1. Angka Kesakitan dan Lamanya Sakit

Salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan penduduk adalah angka kesakitan (*morbidity rate*). Tabel 2.1 menunjukkan besarnya persentase penduduk yang sakit dan rata-rata lamanya sakit. Penduduk yang sakit adalah mereka yang mempunyai keluhan kesehatan sampai mengakibatkan terganggunya pekerjaan, sekolah atau kegiatan sehari-hari.

Tabel 2.1
Angka Kesakitan dan Rata-rata Lamanya Sakit Penduduk
Kota Tangerang Selatan Tahun 2013

Indikator Kesehatan	2012	2013		
	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Angka Kesakitan (%)	10,06	8,45	8,61	8,53
Rata-rata Lamanya Sakit (hari)	4,30	6,63	6,01	6,32

Sumber : Susenas Tahun 2012-2013

Penduduk di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2013 yang mengalami keluhan kesehatan dan mengakibatkan terganggunya aktifitas sehari-hari sebesar 8,53 persen dengan rata-rata lamanya sakit sekitar 6 hari dalam satu bulan. Bila dibandingkan menurut jenis kelamin, angka kesakitan penduduk laki-laki lebih rendah dibanding angka kesakitan penduduk perempuan, yaitu sebesar 8,45 persen untuk laki-laki dan 8,61 persen untuk perempuan. Bila dilihat dari rata-rata lamanya sakit antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, penduduk laki-laki relatif lebih lama yaitu sekitar 6,63 hari untuk laki-laki dan 6,01 hari untuk perempuan.

Bila dilihat perkembangannya dengan tahun 2012 terlihat bahwa persentase penduduk Kota Tangerang Selatan yang mengalami keluhan kesehatan sehingga menyebabkan terganggunya aktifitas sehari-hari terjadi penurunan yang cukup berarti yaitu sebesar 1,53 persen. Tahun 2012 angka kesakitan sebesar 10,06 persen, pada tahun 2013 turun menjadi 8,53 persen. Namun sebaliknya rata-rata lamanya sakit antara tahun 2012 dan tahun 2013 ada kenaikan yang cukup berarti pula yaitu sebesar 2,02 persen. Tahun 2012 rata-rata lamanya sakit dalam satu bulan yaitu sekitar 4 hari sebaliknya tahun 2013 rata-rata lamanya sakit menjadi sekitar 6 hari dalam satu bulan.

Hal ini menunjukkan bahwa walaupun persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan mengganggu aktifitasnya sedikit menurun tetapi dilihat dari rata-rata lamanya sakit dan mengganggu aktifitasnya mengalami peningkatan yaitu dari 4 hari menjadi 6 hari. Ini menggambarkan bahwa dari segi kesehatan secara umum penduduk di Kota Tangerang Selatan tahun 2013 lebih baik dibanding tahun 2012 tetapi dari lamanya gangguan lebih lama dibanding tahun sebelumnya.

2.2. Balita yang diberi ASI dan Imunisasi

Salah satu faktor penting untuk perkembangan anak adalah pemberian air susu ibu (ASI). ASI merupakan zat yang sempurna untuk pertumbuhan bayi dan dapat mempercepat perkembangan berat badan. Selain itu ASI juga mengandung zat penolak/pencegah penyakit serta dapat memberikan kepuasan dan mendekatkan hati ibu dan anak sebagai sarana menjalin hubungan kasih sayang. Sebagian besar ibu-ibu telah menyadari betapa pentingnya ASI bagi bayi, serta menyadari bahwa salah satu kodratnya sebagai seorang ibu adalah menyusui anaknya.

Tabel 2.2
Persentase Balita yang Pernah diberi ASI dan Imunisasi
di Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 - 2013

Indikator Kesehatan	Tahun	
	2012	2013
(1)	(2)	(3)
Pernah diberi ASI (%)	95,45	96,39
Rata-rata lamanya diberi ASI (bulan)	15,58	13,75
Pernah diberi Imunisasi (%)	98,66	97,94

Sumber : Susenas Tahun 2012-2013

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2013 sebagian besar balita di Kota Tangerang Selatan pernah diberi ASI, yaitu mencapai 96,39 persen, masih ada 3,61 persen balita yang tidak diberi ASI. Bila dibandingkan dengan tahun 2012, maka tahun 2013 mengalami sedikit kenaikan. Tahun 2012 persentase balita yang pernah diberi ASI sebesar 95,45 persen naik menjadi 96,39 persen tahun 2013. Sebaliknya dilihat dari segi lamanya diberi ASI tahun 2013 mengalami penurunan, dimana tahun 2012 rata-rata lamanya diberi ASI selama 15,58 bulan turun menjadi 13,75 bulan. Ini

menunjukkan bahwa pada tahun 2013 rata-rata lamanya balita diberi ASI mengalami kenaikan tetapi intensitas lamanya pemberian ASI semakin berkurang. Hal ini bisa terjadi karena semakin bertambahnya perempuan yang bekerja dalam membantu ekonomi rumah tangganya sehingga semakin berkurang waktu untuk mengurus rumah tangganya yang berakibat pada semakin berkurangnya intensitas pemberian ASI pada balita. Dilihat dari tingkat kesempatan kerja perempuan di Kota Tangerang Selatan mengalami kenaikan dibanding tahun lalu. Tahun 2012 tingkat kesempatan kerja perempuan sebesar 88,53 persen naik menjadi 95,58 persen tahun 2013.

Dari segi kesehatan menunjukkan bahwa semakin lama balita diberi ASI akan semakin baik untuk pertumbuhannya baik dari segi fisik maupun perkembangan jiwanya, karena semakin lama pemberian ASI seorang ibu akan semakin dekat dengan anaknya. Selain itu bagi ibunya akan semakin bertambah panjang lamanya waktu kembalinya tingkat kesuburan seorang ibu setelah melahirkan, yang berakibat pada semakin lamanya seorang ibu mengalami kehamilan berikutnya.

Selain melalui pemberian ASI, pencegahan penyakit dapat dilakukan dengan cara pemberian imunisasi kepada balita. Secara umum persentase jumlah balita yang pernah diberi imunisasi di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2013 cukup tinggi. Dari tabel 2.2 terlihat bahwa hanya sebagian kecil balita di Tangerang Selatan yang belum pernah mendapat imunisasi, yaitu sebesar 2,06 persen. Hal ini menunjukkan dari 100 balita di Kota Tangerang Selatan ada sekitar 2 balita yang belum pernah mendapatkan imunisasi. Ini bisa terjadi kemungkinan karena masih adanya ibu yang belum memahami pentingnya imunisasi atau masih adanya sebagian masyarakat yang menganggap bahwa imunisasi dilarang dalam ajaran agama.

Bila dilihat perkembangannya persentase balita yang pernah diberi Imunisasi mengalami sedikit penurunan sebesar 0,72 persen, dimana tahun 2012 persentase balita yang pernah diberi Imunisasi sebesar 98,66 persen dan tahun 2013 sebesar 97,94 persen.

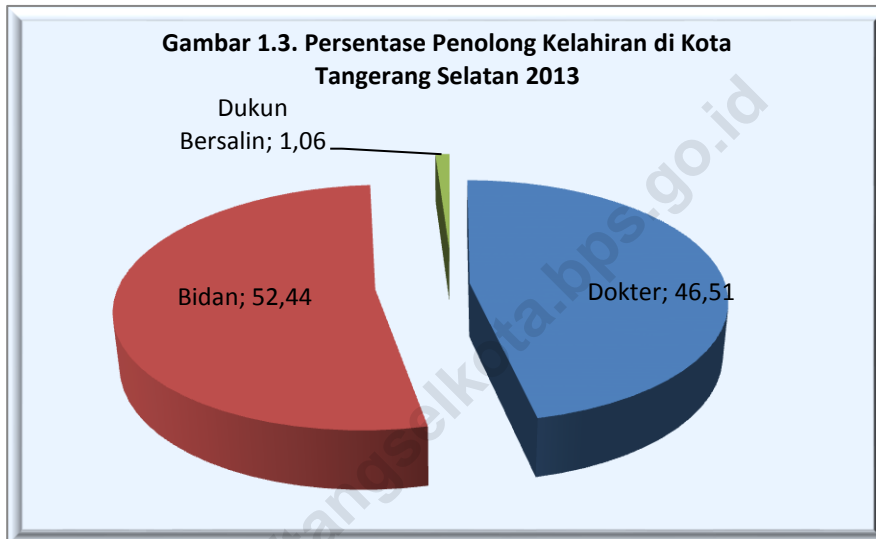
Tingginya persentase balita yang mendapatkan imunisasi dan diberi ASI diharapkan sejalan dengan meningkatnya derajat kesehatan balita sehingga di masa depan akan timbul anak-anak yang sehat dan kuat untuk melanjutkan serta meningkatkan jalannya roda pembangunan khususnya di Kota Tangerang Selatan.

2.3. Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan mencakup peningkatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Tujuan penyediaan fasilitas kesehatan adalah tersedianya fasilitas kesehatan yang mudah dan murah bagi semua lapisan masyarakat. Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan Puskesmas Pembantu (Pustu) selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan penduduk karena mudah terjangkau dan murah, terutama bagi penduduk yang berpenghasilan menengah kebawah karena biaya berobat relatif murah dan terjangkau.

Jumlah Puskesmas di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2013 tercatat sebanyak 25 unit, sedangkan Puskesmas Pembantu sebanyak 15 unit, yang tersebar di 7 kecamatan. Hal lain yang tidak kalah penting dalam pembangunan bidang kesehatan adalah ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan reproduksi. Seperti diketahui bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kematian balita dan ibu melahirkan adalah kelahiran yang tidak aman. Penanganan proses kelahiran sampai dengan setelah kelahiran yang berkualitas dan tepat waktu diharapkan akan mengurangi

resiko kematian bayi dan ibu. Penolong kelahiran balita oleh tenaga medis meliputi dokter, bidan, dan tenaga kesehatan lain. Dukun yang membantu proses kelahiran (dukun beranak) tidak dicakup dalam tenaga medis lainnya walaupun sudah mendapat pelatihan dari Kementerian Kesehatan.



Data penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, kelahiran yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan lebih baik dibandingkan yang ditolong oleh dukun, famili atau lainnya.

Berdasarkan Gambar 1.3, pada tahun 2013 penolong kelahiran di Tangerang Selatan hampir semua dilaksanakan oleh tenaga medis, yaitu sebesar 98,94 persen. Sedangkan yang ditolong oleh tenaga nonmedis hanya sebesar 1,06 persen. Sebagian besar penolong kelahiran oleh tenaga medis dilakukan oleh bidan, yaitu sebesar 52,44 persen, sedangkan penolong kelahiran oleh dokter sebesar 46,51 persen. Hal ini diduga karena biaya kelahiran yang ditolong oleh dokter relatif lebih mahal daripada biaya

kelahiran yang dilakukan oleh bidan. sehingga jumlah kelahiran yang ditolong oleh bidan lebih banyak dibanding kelahiran yang ditolong oleh dokter.

Tabel 2.3
Persentase Penolong Kelahiran di Kota Tangerang Selatan
Tahun 2012 - 2013

Penolong Kelahiran	Tahun	
	2012	2013
(1)	(2)	(3)
Dokter	34,26	46,51
Bidan	62,95	52,44
Dukun Bersalin	2,79	1,06
Tenaga Paramedis Lain	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Total	100	100

Sumber : Susenas 2012 – 2013

Bila dibandingkan antara tahun 2012 dan 2013 seperti yang ada pada tabel 2.3 terlihat bahwa persentase penolong kelahiran yang dilakukan oleh Dokter mengalami kenaikan yang sangat berarti, pada tahun 2012 sebesar 34,26 persen naik menjadi 46,51 persen tahun 2013 (naik 12,25 persen). Sebaliknya untuk penolong kelahiran yang dilakukan oleh Bidan mengalami penurunan sekitar 10,51 persen yaitu sebesar 62,95 persen tahun 2012 turun menjadi 52,41 persen. Begitu juga untuk penolong kelahiran yang dilakukan oleh Dukun Bersalin juga mengalami penurunan, pada tahun 2012 sebesar 2,79 persen turun menjadi 1,06 persen pada tahun 2013 (turun 1,73 persen) Tetapi sebaliknya ada penolong kelahiran yang dilakukan oleh tenaga Lainnya, walaupun kejadiannya sedikit yaitu sekitar 0,37 persen. Untuk tenaga penolong kelahiran yang dilakukan oleh Tenaga

Paramedis maupun tenaga Lainnya tidak ada pada tahun 2013, sama seperti tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan kemampuan penduduk Kota Tangerang Selatan dalam memanfaatkan tenaga kesehatan modern terutama Dokter dan Bidan dalam proses kelahiran dan tidak menggunakan lagi Tenaga Paramedis Lain ataupun penolong kelahiran Lainnya selain Dukun Bersalin.

Tabel 2.4
Persentase Penduduk yang Berobat Sendiri Menurut Jenis Obat yang Digunakan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2012- 2013

Jenis Pengobatan	2012	2013		
	Jumlah	Laki-laki	Jumlah	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(2)	(3)
Modern	89,58	90,61	90,10	90,35
Tradisional	4,72	1,61	3,06	2,34
Lainnya	0,00	0,00	0,44	0,22
Modern+Tradisional	4,58	4,88	4,68	4,77
Modern+ Lain	0,29	1,73	0,51	1,12
Tradisional+ Lain	0,58	0,00	0,00	0,00
Modern+ Tradisional + Lain	0,25	1,18	1,20	1,19

Sumber : Susenas Tahun 2012-2013

Dalam mengatasi gangguan/keluhan kesehatan yang dialaminya, penduduk berusaha melakukan upaya pengobatan baik dengan cara berobat sendiri maupun berobat jalan pada fasilitas kesehatan. Pada tahun 2013, persentase penduduk Kota Tangerang Selatan yang mengalami keluhan kesehatan mengalami penurunan sebesar 1,53 persen dimana tahun 2013 penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sebesar 8,53 persen dan tahun 2012 sebesar 10,06 persen. Dari penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, ada 64,44 persen diantaranya melakukan pengobatan sendiri

dengan cara membeli obat modern, obat tradisional maupun dengan cara pengobatan tradisional seperti kerokan, pijat atau lainnya. Penduduk yang melakukan pengobatan sendiri sebagian besar menggunakan obat modern yaitu sebanyak 90,35 persen. Sedangkan yang berobat menggunakan kombinasi obat modern dengan obat tradisional sebanyak 4,77 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2012 penduduk Kota Tangerang Selatan yang berobat dengan menggunakan obat modern mengalami sedikit peningkatan yaitu sebesar 0,77 persen (tahun 2013 sebesar 90,35 persen dan tahun 2012 sebesar 89,58 persen). Yang menggunakan obat tradisional juga mengalami penurunan yang cukup berarti lebih dari lima puluh persen. Pada tahun 2012 yang menggunakan obat tradisional sebesar 4,72 persen turun menjadi 2,34 persen pada tahun 2013. Sebaliknya yang menggunakan obat lainnya mengalami peningkatan walaupun tidak begitu berarti, dimana tahun 2012 tidak ada, pada tahun 2013 naik menjadi 0,22 persen. Penduduk yang menggunakan pengobatan modern dan lainnya juga mengalami peningkatan dari 0,29 persen pada tahun 2012 naik menjadi 1,12 persen pada tahun 2013. Sebaliknya penduduk yang menggunakan obat tradisional dan lainnya pada tahun 2013 sudah tidak ada lagi dimana pada tahun 2012 yang menggunakan obat tradisional dan lainnya masih ada sebesar 0,58 persen. Demikian juga penduduk yang menggunakan selain obat modern juga obat tradisional dan lainnya juga mengalami peningkatan sebesar 0,94 persen, pada tahun 2012 sebesar 0,25 persen naik menjadi 1,19 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran penduduk Kota Tangerang Selatan menggunakan obat modern cukup tinggi. Tingginya persentase penduduk yang menggunakan obat modern tidak terlepas dari status Kota Tangerang Selatan yang merupakan wilayah perkotaan dengan mayoritas penduduk berpendidikan cukup tinggi (*well educated*) dan banyaknya fasilitas kesehatan yang ada. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Ketersediaan fasilitas kesehatan serta akses yang mudah dan relatif murah merupakan salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fasilitas kesehatan yang lengkap memudahkan penduduk yang sakit agar cepat mendapatkan pelayanan pengobatan sehingga pada akhirnya derajat kesehatan penduduk akan meningkat.

Tabel 2.5
Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat
di Kota Tangerang Selatan Tahun 2012- 2013

Tempat Berobat	2012	2013		
	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rumah Sakit	21,76	15,68	11,71	13,68
Puskesmas (termasuk Pustu)	23,85	24,87	24,71	24,79
Klinik KIA/BP	47,54	52,56	52,35	52,45
Petugas Kesehatan Lain	2,41	4,84	7,35	6,10
Pengobatan Tradisional	3,21	2,04	2,10	2,07
Lainnya	1,24	0,01	1,78	0,90
Penduduk Berobat Jalan	31,54	10,27	10,44	10,36

Sumber : Susenas Tahun 2012-2013

Dalam menangani keluhan kesehatan penduduk di Kota Tangerang Selatan selain mengobati sendiri juga ada yang melakukan pengobatan dengan berobat jalan ke fasilitas kesehatan yang ada. Sekitar 46,30 persen diantaranya dengan melakukan berobat jalan. Persentase penduduk di Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 yang mengalami keluhan kesehatan ada sebanyak 8,53 persen yang terdiri dari laki-laki sebesar 8,45 persen dan perempuan sebesar 8,61 persen. Bila dilihat menurut jenis pengobatan, penduduk Kota Tangerang Selatan ada yang melakukan pengobatan sendiri ataupun dengan cara berobat jalan. Hal ini berhubungan dengan berat

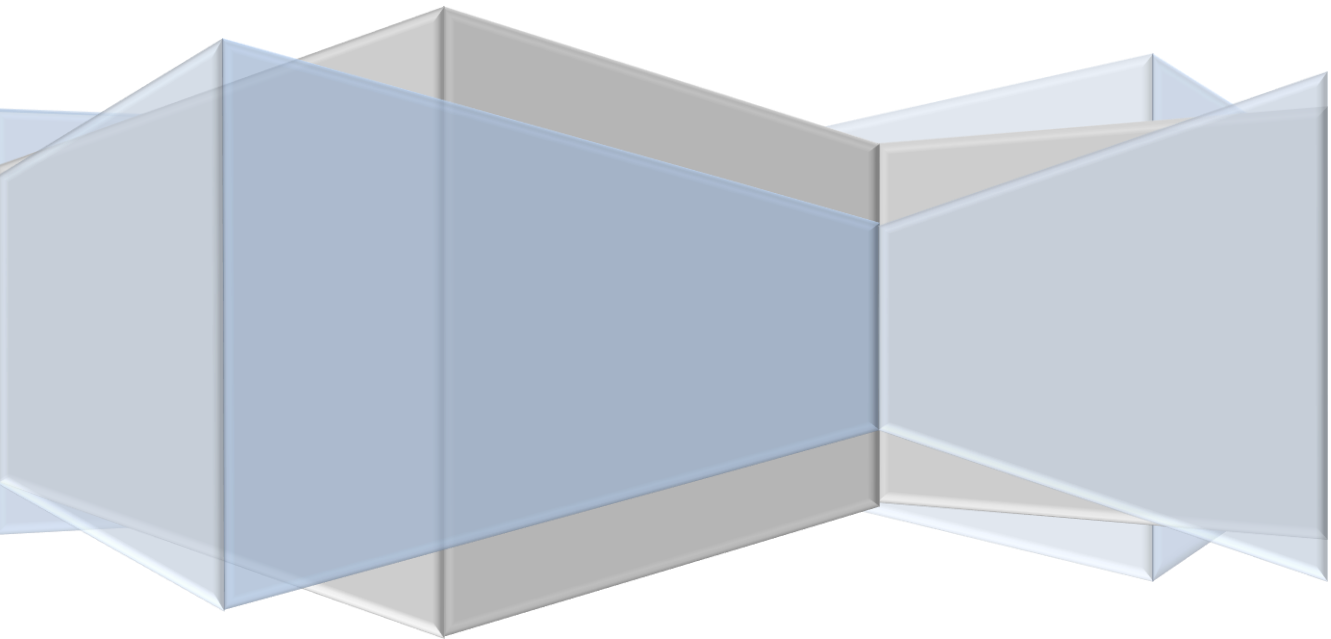
ringannya penyakit yang diderita, ataupun berhubungan dengan akses kesehatan yang ada.

Penduduk yang melakukan pengobatan dengan jalan mengobati sendiri sudah dijelaskan dihalaman sebelumnya (Tabel 2.4). Penduduk Kota Tangerang Selatan yang berobat jalan ketika mengalami gangguan kesehatan dengan jalan berobat ke fasilitas kesehatan yang ada. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terlihat bahwa penduduk yang melakukan pengobatan dengan berobat jalan mengalami penurunan yang sangat berarti yaitu sebesar 21,18 persen dimana tahun 2012 penduduk yang berobat jalan sebesar 31,54 persen turun menjadi 10,36 persen tahun 2013. Dilihat dari tempat melakukan pengobatan penduduk Kota Tangerang Selatan paling banyak memanfaatkan Klinik KIA/Balai Pengobatan sebagai tempat berobat jalan yaitu sebanyak 52,45 persen. Penduduk yang memilih Puskesmas/Pustu sebanyak 24,79 persen, dan penduduk yang berobat ke Rumah Sakit sebanyak 13,68 persen. Sedangkan yang memilih pengobatan tradisional dan lainnya sebanyak 2,97 persen. Seperti disajikan pada tabel 2.4 terlihat bahwa jenis fasilitas kesehatan selain Klinik KIA/BP adalah Puskesmas/Pustu dan Rumah Sakit yang sering digunakan dan menjadi alternatif pilihan penduduk. Hal ini bisa terjadi selain karena akses ke sarana kesehatan tersebut khususnya di Kota Tangerang Selatan lebih mudah dan biaya masih relatif terjangkau oleh mayoritas penduduk di Kota Tangerang Selatan, serta tingkat pengetahuan penduduk akan pentingnya kesehatan cukup tinggi.

BAB III

PENDIDIKAN

<http://jangselkota.bps.go.id>



Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam kehidupan dan merupakan faktor yang dominan dalam proses pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan selain dibutuhkan dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul seiring perubahan zaman juga dapat membawa pengaruh positif dalam berbagai sendi-sendi kehidupan, sehingga tidaklah mengherankan apabila pendidikan senantiasa banyak mendapat perhatian yang lebih.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Indikator pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat melalui tingkat kemampuan membaca dan menulis (angka melek huruf) penduduk. Kemampuan membaca dan menulis dibedakan terhadap huruf latin, huruf lainnya, dan tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf). Dengan memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin akan menjadikan seseorang lebih mudah memahami dan menyerap berbagai informasi baik dari media cetak maupun elektronik sehingga akan menambah pengetahuan bagi dirinya. Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan buta huruf adalah penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya.

3.1. Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS)

Salah satu kebutuhan dasar penduduk untuk berkomunikasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Dimana hal ini merupakan

keterampilan minimum yang dibutuhkan penduduk dalam proses bermasyarakat, sehingga penduduk dapat berperan lebih aktif dalam pembangunan ekonomi yang berkesinambungan di Kota Tangerang Selatan.

Kemampuan membaca dan menulis tercermin dari indikator angka melek huruf. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan salah satu indikator pencapaian program pendidikan di Indonesia. Secara matematis angka ini memperlihatkan rasio antara jumlah penduduk yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia sepuluh tahun keatas dalam satuan ratusan. Indikator tersebut penting mengingat melek huruf merupakan pintudari segala ilmu pengetahuan.

Tabel 3.1

Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin di Kota Tangerang Selatan Tahun 2013-2013

Indikator	2012	2013		
	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Angka melek huruf(%)	98,03	99,55	97,11	98,33
Rata-rata lama sekolah (tahun)	10,80	11,45	10,60	11,03

Sumber : Susenas Tahun 2012 - 2013

Pada tahun 2013 terdapat 98,33 persen penduduk berusia 10 tahun keatas di Kota Tangerang Selatan yang sudah mampu membaca dan menulis huruf latin, sedangkan sisanya sebanyak 1,67 persen masih belum/tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf). Bila dibandingkan antara penduduk laki-laki dan perempuan, persentase penduduk laki-laki yang melek huruf lebih tinggi dibanding perempuan yaitu 99,55 persen berbanding 97,11 persen seperti terlihat pada Tabel 3.1. Bila dibandingkan dengan tahun 2012 maka AMH tahun 2013 mengalami sedikit peningkatan

sebesar 0,30 persen. Tahun 2012 AMH penduduk Kota Tangerang Selatan sebesar 98,03 persen dan tahun 2013 sebesar 98,33 persen.

Indikator lain untuk melihat tingkat pendidikan adalah angka rata-rata lama sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah menunjukkan berapa lama rata-rata penduduk suatu wilayah duduk di bangku sekolah dalam mengikuti program pendidikan. Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Tangerang Selatan pada tahun 2013 mencapai 11,03 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk Tangerang Selatan baru dapat bersekolah hingga jenjang SMA kelas dua. Bila dibandingkan menurut jenis kelamin, rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki lebih lama dibandingkan perempuan, yaitu 11,45 tahun berbanding 10,60 tahun. Penduduk laki-laki dapat bersekolah hingga jenjang SMA kelas dua sedangkan penduduk perempuan hingga jenjang SMA kelas satu.

Bila dilihat perkembangannya dari tahun 2012 hingga tahun 2013, rata-rata lama sekolah penduduk Kota Tangerang Selatan tahun 2012 sebesar 10,80 persen yang berarti rata-rata penduduk bersekolah hingga SMA kelas satu sedangkan tahun 2013 rata-rata lama sekolah sebesar 11,03 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tahun 2013 rata-rata penduduk Kota Tangerang Selatan bersekolah pada jenjang pendidikan SMA kelas 2. (Untuk penduduk laki-laki sudah tercapai bahkan hampir mendekati kelas 3 SMA sedangkan penduduk perempuan baru mendekati kelas 2 SMA, seperti yang terlihat di tabel 3.1 diatas).

3.2. Tingkat Pendidikan yang ditamatkan dan Partisipasi Sekolah

Selain indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, gambaran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilihat juga dari tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk. Pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator pokok kualitas pendidikan formal yang

merupakan gambaran kualitas SDM suatu wilayah. Dengan semakin banyaknya persentase penduduk yang menamatkan pendidikan di pendidikan menengah keatas maka kualitas SDM suatu wilayah akan semakin baik, karena dengan SDM yang memadai maka akan lebih mudah untuk mengembangkan kemampuan, kreatifitas dan kualitasnya.

Tabel 3.2
Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditematkan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 - 2013

Tingkat Pendidikan	2012	2013		
	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tidak/Belum Tamat SD/MI/Sederajat	11,32	9,94	12,27	11,09
SD/MI/Sederajat	15,65	13,75	17,95	15,82
SMP/Sederajat	18,75	16,90	18,09	17,49
SMA/SMK/Sederajat	35,33	38,61	32,85	35,77
Universitas/PT	18,94	20,80	18,84	19,83
J U M L A H	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas Tahun 2012 - 2013

Berdasarkan Tabel 3.2 terlihat bahwa pada tahun 2013 sebagian besar penduduk usia 10 tahun keatas di Kota Tangerang Selatan mampu menamatkan pendidikan tertinggi sampai SMA/ sederajat, yaitu sebanyak 35,77 persen. Sedangkan penduduk yang dapat menamatkan pendidikan tertinggi hingga tingkat SMP/ sederajat mencapai 17,49 persen, menamatkan pendidikan tertinggi hingga tingkat SD/ sederajat mencapai 15,82 persen dan penduduk yang sudah dapat menamatkan hingga tingkat Universitas/PT mencapai 19,83 persen. Sedangkan yang tidak atau belum tamat SD sebesar 11,09 persen.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, maka terlihat bahwa tingkat pendidikan penduduk laki-laki sedikit lebih baik dibandingkan penduduk

perempuan, terutama untuk tingkat pendidikan yang ditamatkan SMA/ sederajat dan Universitas/PT. Pada tahun 2013 tingkat pendidikan yang ditamatkan SMA/ sederajat untuk laki-laki sebesar 38,61 persen sedangkan untuk perempuan sebesar 32,85 persen. Demikian juga untuk tingkat pendidikan yang ditamatkan Universitas/PT, untuk laki-laki sebesar 20,80 persen sedangkan perempuan sebesar 18,84 persen. Kondisi ini kemungkinan antara lain disebabkan oleh faktor budaya pada sebagian masyarakat yang lebih mementingkan pendidikan untuk anak laki-laki dibandingkan anak perempuan karena laki-laki adalah yang bertanggung jawab dalam rumah tangganya.

Apabila dilihat perubahannya dari tahun 2012 ke tahun 2013 persentase penduduk 10 tahun keatas tingkat pendidikan yang ditamatkan untuk SMA/ sederajat dan tamat Universitas/PT mengalami peningkatan. Yang menamatkan SMA/ sederajat tahun 2012 sebesar 35,33 pada tahun 2013 naik menjadi 35,77 persen. Yang menamatkan Universitas/PT tahun 2012 sebesar 18,94 persen tahun 2013 naik menjadi 19,83 persen. Sebaliknya penduduk usia 10 tahun keatas yang menamatkan pendidikan SMP/ sederajat dan Tidak/ belum tamat SD mengalami penurunan. Yang menamatkan pendidikan SMP/ sederajat tahun 2012 sebesar 18,75 persen turun menjadi 17,49 persen tahun 2013. Demikian juga penduduk usia 10 tahun keatas yang tidak/ belum tamat SD/ sederajat turun dari 11,32 persen tahun 2012 menjadi 11,09 persen tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan yang ditamatkan penduduk di Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan. Lebih dari setengah penduduk usia 10 tahun keatas menamatkan pendidikannya SMA/ sederajat dan Universitas/PT. Tentunya peningkatan kualitas pendidikan di Kota Tangerang Selatan berhubungan erat dengan adanya peningkatan taraf hidup kesejahteraan penduduknya.

Tabel 3.3
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah Kota Tangerang Selatan
Tahun 2012 - 2013

Kelompok Umur	2012	2013
	Persentase	Persentase
(1)	(2)	(3)
Usia 7 – 12 tahun		
Laki-laki	99,23	99,77
Perempuan	100	98,74
Jumlah	99,61	99,25
Usia 13 – 15 tahun		
Laki-laki	91,99	94,36
Perempuan	95,34	96,91
Jumlah	93,58	95,59
Usia 16 – 18 tahun		
Laki-laki	72,44	76,61
Perempuan	65,68	63,86
Jumlah	68,85	69,96

Sumber : Susenas Tahun 2012 - 2013

Partisipasi penduduk dalam mengikuti program pendidikan di Kota Tangerang Selatan dapat dilihat dari besarnya indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka Partisipasi Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Nilai ideal APS adalah 100 persen dan tidak akan terjadi lebih besar dari 100 %, karena murid usia sekolah dihitung dari murid yang ada di semua jenjang pendidikan pada suatu daerah. APS disajikan dalam tiga tingkatan usia, yaitu APS anak usia 7-12 tahun, usia 13-15 tahun dan usia 16-18 tahun.

Pada tahun 2013 APS Kota Tangerang Selatan untuk anak usia 7-12 tahun sebesar 99,77 persen. Angka ini menunjukkan bahwa hampir semua anak usia 7-12 tahun masih bersekolah, kurang dari 1 (satu) persen yang tidak bersekolah. Anak yang tidak bersekolah terdiri dari anak yang sudah memasuki usia sekolah tetapi belum bersekolah dan anak yang putus sekolah. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, untuk usia 7-12 tahun anak laki-laki lebih tinggi partisipasinya dibanding anak perempuan, tetapi untuk anak usia 13-15 tahun partisipasi sekolah anak laki-laki lebih rendah dibanding anak perempuan. Sedangkan untuk usia 16-18 tahun partisipasi sekolah anak laki-laki lebih tinggi dibanding anak perempuan.

APS anak usia 13-15 tahun lebih rendah dibanding APS anak usia 7-12 tahun. Demikian juga APS anak usia 16-18 tahun jauh lebih rendah dibanding APS anak usia 7-12 tahun. Pada tahun 2013 APS anak usia 7-12 tahun sebesar 99,77, APS anak usia 13-15 tahun sebesar 95,59 persen dan APS anak usia 16-18 tahun sebesar 69,96 persen. Angka ini menunjukkan bahwa dari 100 anak usia 7-12 tahun hampir semuanya sedang bersekolah, untuk anak usia 13-15 tahun dari 100 anak ada sekitar 5 orang yang tidak bersekolah. Sedangkan untuk anak usia 16-18 tahun keadaanya lebih rendah, yaitu dari 100 anak usia 16-18 tahun hanya sekitar 70 anak yang sedang bersekolah sedangkan yang tidak bersekolah ada sekitar 30 anak. Semakin tinggi usia anak, partisipasi sekolahnya semakin menurun. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula biaya yang harus dikeluarkan.

Bila dibandingkan dengan tahun 2012 terlihat bahwa APS tahun 2013 terdapat penurunan khususnya APS usia 7-12 tahun, sedangkan APS usia 7-12 tahun dan APS usia 16-18 mengalami kenaikan. APS usia 7-12 tahun sebesar 99,61 persen tahun 2012 turun menjadi 99,25 persen tahun

2013. Penurunan ini sebagian besar terjadi pada anak perempuan yaitu dari 100 persen tahun 2012 turun menjadi 98,74 persen pada tahun 2013. APS usia 13-15 tahun sebesar 93,58 persen pada 2012 naik menjadi 95,59 persen tahun 2013. Demikian juga APS usia 16-18 tahun juga mengalami kenaikan. Tahun 2012 APS usia 16-18 tahun sebesar 68,85 persen naik menjadi 69,96 persen (naik 1,11 persen). Selain APS sebagai salah satu indikator pendidikan juga ada Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) juga digunakan sebagai indikator pendidikan.

Tabel 3.4
APM dan APK Kota Tangerang Selatan menurut
Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2012-2013

Jenjang Pendidikan	2012		2013	
	APM(%)	APK (%)	APM(%)	APK (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/Sederajat				
Laki-laki	93,71	102,47	98,28	101,46
Perempuan	91,67	100,13	97,80	98,31
Jumlah	92,74	101,36	98,04	99,87
SMP/Sederajat				
Laki-laki	77,44	94,06	70,74	86,81
Perempuan	71,85	97,05	79,34	85,19
Jumlah	74,79	95,47	74,90	86,02
SMA/Sederajat				
Laki-laki	67,53	81,87	54,20	68,80
Perempuan	56,79	75,24	51,76	65,58
Jumlah	61,83	78,35	52,93	67,13

Sumber : Susenas Tahun 2012 – 2013

APM dan APK digunakan untuk melihat partisipasi anak/masyarakat terhadap dunia pendidikan. APM merupakan persentase penduduk usia sekolah yang masih sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya. Sedangkan APK merupakan persentase penduduk yang masih

sekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Dari Tabel 3.4 terlihat bahwa pada tahun 2013 APM penduduk di Kota Tangerang Selatan untuk jenjang pendidikan SD/ sederajat tercatat sebesar 98,04 persen. Angka ini menunjukkan bahwa dari 100 anak usia 7-12 tahun di Kota Tangerang Selatan ada sekitar 98 anak diantaranya sedang bersekolah pada jenjang pendidikan SD/ Sederajat. Sedangkan APM jenjang pendidikan SMP/ Sederajat dan SMA/ Sederajat masing-masing tercatat sebesar 74,90 persen dan 52,93 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk usia 13-15 tahun ada sekitar 75 anak yang bersekolah di SMP/ sederajat dan dari 100 anak usia 16-18 tahun ada sekitar 53 anak yang bersekolah di SMA/ sederajat.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2013, APM laki-laki untuk jenjang pendidikan SD/ sederajat lebih tinggi dibanding APM perempuan. Demikian juga untuk jenjang pendidikan SMA/ sederajat. Namun sebaliknya untuk jenjang pendidikan SMP/ sederajat APM laki-laki lebih rendah dibanding perempuan. Pada tahun 2013 untuk jenjang pendidikan SMP/ sederajat APM laki-laki sebesar 70,74 persen sedangkan APM perempuan sebesar 79,34 persen. Untuk jenjang pendidikan SD/ sederajat pada tahun 2013 APM laki-laki sebesar 98,28 persen sedangkan perempuan sebesar 97,80 persen. Jenjang pendidikan SMA/ sederajat APM laki-laki sebesar 54,20 persen sedangkan perempuan 51,76 persen. Selain APS dan APM digunakan juga APK untuk melihat partisipasi anak sekolah pada jenjang pendidikan tertentu.

Pada Tahun 2013 APK jenjang pendidikan SD/ sederajat tercatat hampir mendekati 100 persen yaitu sebesar 99,87 persen, tetapi kkalau

dilihat dari jenis kelamin, maka APK anak laki-laki sudah mencapai 101,46 persen. Hal ini menunjukkan bahwa program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajardikdas) 6 tahun di Kota Tangerang Selatan untuk anak laki-laki sudah tercapai. Namun untuk APK SMP/ sederajat belum mencapai angka 100, yaitu mencapai 86,02 persen. Bahkan APK SMA/ sederajat baru mencapai 67,13 persen.

Berdasarkan Tabel 3.4, terlihat perbedaan yang cukup signifikan antara indikator APM dan APK di semua jenjang pendidikan, kecuali jenjang pendidikan SD/ sederajat. Selisih antara nilai APM dan APK menunjukkan jumlah anak yang umurnya ada dibawah ataupun diatas kelompok umur pada jenjang sekolah tertentu. Pada tahun 2013 untuk jenjang pendidikan SD/ sederajat APM sebesar 98,04 persen dan APK sebesar 101,46 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 anak yang sedang bersekolah di SD/ sederajat ada sekitar 97 anak yang berusia 7-12 tahun, sedangkan 3 anak lainnya usianya kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun. Demikian juga halnya untuk jenjang pendidikan SMP/ sederajat APM sebesar 74,90 persen sedangkan APK sebesar 86,02 persen. Ini menunjukkan bahwa dari 86 anak yang masih bersekolah di SMP/ sederajat ada sekitar 75 anak yang berusia 13-15 tahun, sedangkan 11 anak lainnya berusia kurang dari 13 tahun atau diatas 15 tahun. APM SMA/ sederajat sebesar 52,93 persen sedangkan APK sebesar 67,13 persen. Ini menunjukkan bahwa dari 67 anak yang sedang bersekolah di SMA/ sederajat ada sekitar 53 anak yang berusia 16-18 tahun, sedangkan 14 anak lainnya berusia dibawah 16 tahun atau diatas 18 tahun.

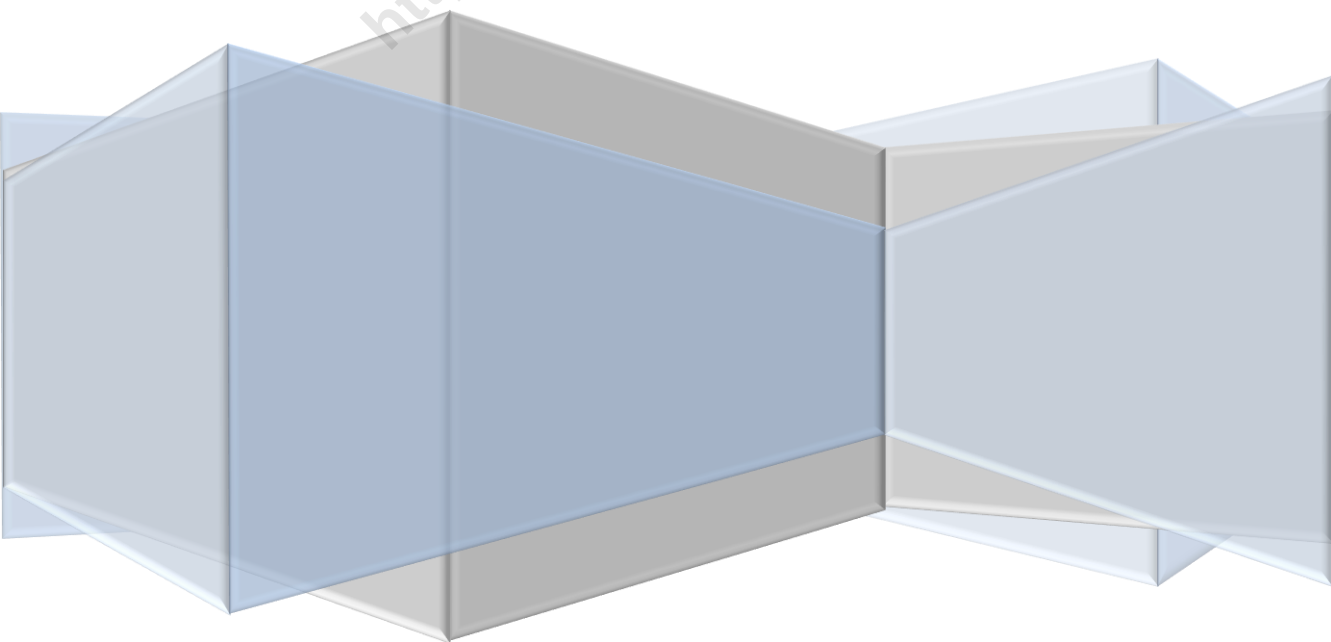
Bila dibandingkan antara tahun 2012 dan 2013 dari tabel 3.4 terlihat bahwa APM disemua tingkatan jenjang pendidikan mengalami kenaikan, kecuali APM jenjang pendidikan SMA/ sederajat. Bila dilihat menurut jenis

kelamin khususnya dijenjang pendidikan SMP/ sederajat angka APM laki-laki mengalami penurunan, pada tahun 2012 APM laki-laki sebesar 77,44 persen turun menjadi 70,74 persen tahun 2013, namun sebaliknya APM perempuan mengalami kenaikan. Pada tahun 2012 APM perempuan jenjang pendidikan SMP/ sederajat sebesar 71,85 persen naik menjadi 79,34 persen tahun 2013. Untuk APM SD/ sederajat pada tahun 2012 sebesar 92,74 persen naik menjadi 98,04 persen. Bila dilihat menurut jenis kelamin maka APM SD/ sederajat baik laki-laki maupun perempuan mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2012 sebesar 93,71 persen untuk laki-laki naik menjadi 98,28 persen, demikian juga untuk perempuan dari 91,67 persen pada tahun 2012 naik menjadi 97,90 persen tahun 2013. Sebaliknya untuk APM jenjang pendidikan SMA/ sederajat mengalami penurunan. Pada tahun 2012 APM laki-laki sebesar 67,53 persen turun menjadi 54,20 persen pada tahun 2013. Demikian juga untuk jenis kelamin perempuan, pada tahun 2012 sebesar 56,79 persen turun menjadi 51,76 persen tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa untuk jenjang pendidikan khususnya SMA/ sederajat mengalami penurunan. Seperti kita ketahui bahwa pada tahun 2013 terjadi kenaikan harga BBM yang cukup tinggi yaitu dari RP. 4500,- naik menjadi Rp. 6500,- yang sangat mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat terutama ekonomi menengah kebawah, sementara untuk pemenuhan kebutuhan primer tidak berkurang yang mengakibatkan berkurangnya pemenuhan kebutuhan sekunder salah satunya untuk keperluan sekolah.

BAB IV

KETENAGAKERJAAN

<http://tamanselkota.bps.go.id>



Data ketenagakerjaan dewasa ini semakin diperlukan, terutama untuk evaluasi dan perencanaan pembangunan di bidang ketenagakerjaan seperti peningkatan keterampilan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta produktifitas tenaga kerja. Sangat masuk akal jika analisis mengenai kualitas sumber daya manusia biasanya menempatkan faktor ketenagakerjaan sebagai salah satu dimensi yang vital. Penciptaan lapangan pekerjaan sebagai fokus pembangunan bidang ketenagakerjaan saat ini diharapkan memberikan efek langsung pada pengurangan jumlah penduduk miskin dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut konsep yang dipakai BPS dalam Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), bekerja diartikan sebagai kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji termasuk semua tunjangan dan bonus bagi pekerja/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa atau keuntungan, baik berupa uang atau barang termasuk bagi pengusaha.

Kondisi ketenagakerjaan di Kota Tangerang Selatan digambarkan melalui beberapa indikator karakteristik ketenagakerjaan. Indikator ketenagakerjaan tersebut diantaranya adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), tingkat kesempatan kerja (TKK) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Indikator ketenagakerjaan tersebut merupakan gambaran kegiatan penduduk yang termasuk sebagai Penduduk Usia Kerja (PUK) dalam bekerja memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan. PUK sebagaimana konsep International Labour Organization (ILO) adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas. Berdasarkan kegiatannya dalam

kaitan ketenagakerjaan, penduduk usia kerja dikelompokkan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. PUK yang masuk dalam angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan. Sedangkan kegiatan PUK yang tergolong bukan angkatan kerja adalah sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

4.1. Indikator Ketenagakerjaan

Indikator Ketenagakerjaan merupakan indikator ekonomi yang mempunyai arti penting dalam beberapa aspek. Dari indikator ketenagakerjaan ini dapat diperoleh gambaran dan permasalahan ketenagakerjaan, seperti penduduk usia kerja, angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK).

Penduduk Usia Kerja adalah penduduk berumur 15 tahun keatas.

Penduduk yang termasuk Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang mengurus rumah tangga, sekolah atau melaksanakan kegiatan lainnya.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) dengan jumlah penduduk usia kerja, dan biasanya dinyatakan dalam persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja, biasanya dinyatakan dalam persen.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah penduduk angkatan kerja, biasanya dinyatakan dalam persen.

Tabel 4.1
Indikator Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2013

Karakteristik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Penduduk Usia Kerja	537.927	532.849	1.070.776
2. Angkatan Kerja	429.377	220.882	650.259
a. Bekerja	409.505	211.122	620.627
b. Pengangguran	19.872	9.760	29.632
3. Bukan Angkatan Kerja :	108.550	311.967	420.517
a. Sekolah dan Mengurus RT	89.081	305.858	394.919
b. Lainnya	19.489	6.109	25.598
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	79,82	41,45	60,73
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,63	4,42	4,56
6. Tingkat Kesempatan Kerja (%)	95,37	95,58	95,44

Sumber : Sakernas Tahun 2013

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2013 yang ditampilkan pada Tabel 4.1, penduduk Kota Tangerang Selatan yang masuk kategori penduduk usia kerja sebanyak 1.070.776 jiwa, terdiri atas 537.927 laki-laki dan 532.849 perempuan. Penduduk usia kerja yang tergolong dalam angkatan kerja sebanyak 650.259 jiwa, terdiri atas 429.377 laki-laki dan 220.882 perempuan. Angkatan kerja yang bekerja sebanyak 620.627 jiwa terdiri dari 409.505 laki-laki dan 211.122 perempuan dan yang menjadi pengangguran sebanyak 29.632 jiwa (19.872 laki-laki dan 9.760 perempuan). Sedangkan penduduk yang bukan tergolong angkatan kerja sebanyak 420.517 jiwa, dimana 394.919 jiwa sedang sekolah dan mengurus rumah tangga dan 25.598 jiwa melakukan kegiatan lain.

Partisipasi penduduk usia kerja dalam bekerja dan mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan rumah tangganya dapat dilihat melalui angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), pada tahun 2013 persentase penduduk yang masuk dalam usia kerja dan aktif dalam bekerja dan mencari pekerjaan (TPAK) tercatat sebesar 60,73 persen. Angka tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa ada sekitar 60 persen dari penduduk usia kerja di Kota Tangerang Selatan yang berpotensi untuk mendapatkan pendapatan/penghasilan, walaupun di dalamnya termasuk mereka yang sedang mencari pekerjaan. Bila dibandingkan menurut jenis kelamin, maka ada perbedaan yang signifikan antara TPAK penduduk laki-laki dan perempuan. TPAK laki-laki sebesar 79,82 persen sedangkan TPAK perempuan sebesar 41,45 persen.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kontribusi perempuan dalam kegiatan ekonomi belum maksimal. Implikasinya banyak perempuan yang masih menjadi kelompok bukan angkatan kerja. Mengurus rumah tangga, adalah kegiatan yang paling banyak dilakukan perempuan. Diduga pula, pergeseran nilai-nilai budaya terutama dalam hal bekerja secara ekonomis, yang terjadi di Kota Tangerang Selatan belum bergerak cepat. Istilah bahwa yang mencari pekerjaan (mencari nafkah) adalah kewajiban laki-laki masih cukup kuat berakar dalam budaya kita.

Salah satu informasi penting lain yang didapat dari kegiatan Sakernas 2013 adalah diperolehnya angka pengangguran. Informasi ini vital, terutama berkenaan dengan kemampuan sektor-sektor ekonomi yang ada untuk menyerap tenaga kerja kedalam aktivitas ekonomi produktif. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara tidak langsung dapat menggambarkan kondisi ekonomi suatu wilayah. Tinggi rendahnya angka ini

memiliki kepekaan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat maupun keamanan dan stabilitas regional.

Berdasarkan Tabel 4.1, secara umum Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2013 sebesar 4,56 persen. Sedangkan jika dilihat menurut jenis kelamin, TPT laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan, dimana TPT laki-laki sebesar 4,63 persen sedangkan TPT perempuan sebesar 4,42 persen. Kondisi ini salah satunya diakibatkan oleh relatif masih rendahnya tingkat pendidikan perempuan dibanding laki-laki, khususnya pendidikan SMA keatas seperti yang terlihat pada tabel 3.2 bahwa pendidikan yang ditamatkan untuk jenjang pendidikan SMA/ sederajat dan Perguruan Tinggi penduduk laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan, sehingga perempuan kalah bersaing dalam mengisi kesempatan kerja yang tersedia.

Kebalikan dari TPT, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kota Tangerang Selatan sebesar 95,44 persen. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aktifitas ekonomi di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2013 belum bisa menyerap seluruh angkatan kerja yang tersedia yaitu sekitar 95 persen, masih ada sekitar 5 persen dari angkatan kerja yang belum terserap dan menjadi pengangguran. Angka TPT sebesar 4,56 persen menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan khususnya oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan serta para pengusaha dan seluruh lapisan masyarakat.

4.2. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Tabel 4.2 menunjukkan sebaran penduduk yang bekerja menurut sektor/lapangan usaha, yaitu Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Jasa-jasa dan sektor/lapangan usaha lainnya (Pertambangan/penggalian, Angkutan dan telekomunikasi, Listrik,

gas, air bersih, Keuangan dan Konstruksi). Dalam sudut pandang perekonomian, untuk mengetahui sektor apa yang paling dominan di suatu wilayah biasanya dilihat dari peranan sektor tersebut dalam penyerapan tenaga kerja dan pembentukan nilai tambah (PDRB). Namun tidak selamanya sektor yang dominan menyerap tenaga kerja menjadi sektor yang paling banyak menciptakan nilai tambah. Perbedaan produktifitas tenaga kerja antar sektor dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi penyebab terjadinya hal tersebut.

Tabel 4.2
Komposisi Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin Tahun 2013

Sektor/Lapangan Usaha	Persentase		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian	0,60	0,00	0,40
2. Industri Pengolahan	7,63	7,50	7,59
3. Perdagangan, Hotel, Restoran	25,58	37,68	29,69
4. Jasa – jasa	27,45	34,58	29,87
5. Lainnya	38,74	20,24	32,45
T o t a l	100,00	100,00	100,00
Jumlah	409.505	211.122	620.627

Sumber : Sakernas Tahun 2013

Jika dilihat penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor yang ada, mayoritas penduduk di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2013 bekerja di sektor lainnya yaitu sebesar 32,45 persen kemudian sektor jasa-jasa, yaitu sebesar 29,87 persen dan sektor perdagangan sebesar 29,69 persen. Sementara itu, sektor industry pengolahan sebesar 7,59 persen dan sektor pertanian masih ada 0,40 persen. Bila dilihat menurut jenis kelamin di Sektor Perdagangan, Hotel, Restoran dan Sektor Jasa-jasa pekerja perempuan lebih banyak dibandingkan pekerja laki-laki. Penduduk

perempuan lebih banyak yang bekerja di dua sektor tersebut karena selain bekerja untuk membantu mencari nafkah, mereka masih bisa mengatur waktu untuk mengurus keluarga di rumah.

Tabel 4.3
Komposisi Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin Tahun 2013 (persen)

Status Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Pengusaha	17,90	18,80	18,21
a. Berusaha sendiri	12,82	15,91	13,87
b. Berusaha dibantu pekerja takdibayar	2,17	1,65	1,99
c. Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	2,91	1,24	2,34
II. Buruh/karyawan	81,15	75,02	79,06
III. Pekerja bebas	0,65	1,28	0,86
IV. Pekerja keluarga/tak dibayar	0,31	4,90	1,87
Jumlah	100	100	100

Sumber : Sakernas Tahun 2013

Jika dilihat menurut status pekerjaan maka dapat dilihat bahwa sektor formal memiliki peranan yang signifikan dalam hal penyerapan tenaga kerja di Kota Tangerang Selatan. Pada tabel 4.3 terlihat bahwa proporsi pekerja yang bekerja sebagai buruh/karyawan dan berusaha dibantu buruh tetap/dibayar (kategori status formal) tercatat sebesar 81,40 persen, sisanya sebesar 18,60 persen masuk kategori status informal. Tingginya peranan sektor formal dalam menyerap pekerja dapat mengindikasikan kemajuan perekonomian Kota Tangerang Selatan karena pekerja status formal lebih terjamin haknya, terutama dalam hal pendapatan rutin yang diterima. Bila dilihat menurut jenis kelamin, maka terdapat perbedaan yang cukup berarti antara persentase pekerja sektor formal berjenis kelamin laki-laki dengan perempuan dimana pekerja laki-laki

lebih banyak persentasenya dibanding perempuan yaitu sebesar 84,06 persen sedangkan perempuan sebesar 76,26 persen.

Salah satu dimensi penting terkait dengan ketenagakerjaan adalah kebutuhan akan lapangan pekerjaan yang semakin meningkat. Namun, kesempatan kerja di sektor formal dirasakan tidak sesuai antara jumlah yang diminta (*demand*) dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan (*supply*) oleh para pencari kerja. Akibatnya, sektor informal dianggap sebagai jawaban yang tepat dan mudah atas masalah ketenagakerjaan. Sektor informal tampaknya memainkan peranan cukup penting di dunia, meskipun terkesan diabaikan atau bahkan dianaktirikan. Di beberapa kota besar di negara berkembang peranan sektor informal dalam menyerap angkatan kerja cukup besar (*www.unchs.org*), yaitu di New Delhi, India (61,4 persen) dan Dhaka, Bangladesh (60 persen). Sektor informal di Kota Tangerang Selatan yang mampu menyerap 18,60 persen telah menjadi alternatif bagi sebagian pekerja yang tidak tertampung pada sektor formal.

4.3. Jumlah Jam Kerja

Dalam kajian ketenagakerjaan, seorang pekerja dapat dikategorikan sebagai pengangguran apabila memiliki jam kerja selama seminggu dibawah jam kerja normal. Kesepakatan tentang jumlah jam kerja normal di Indonesia adalah minimal 35 jam selama seminggu. Istilah lain dari persentase penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal disebut sebagai pengangguran kentara (*visible underemployed*) atau setengah pengangguran.

Pada konsep yang dipakai BPS di Sakernas, jam kerja juga digunakan sebagai penentu lapangan pekerjaan utama bila seseorang mempunyai lebih dari satu jenis pekerjaan. Maksudnya, bila seseorang bekerja pada lebih dari satu lapangan pekerjaan yang berbeda (berlainan kode KBLI), maka yang

dianggap sebagai lapangan pekerjaan utama adalah lapangan pekerjaan yang jam kerjanya lebih banyak dari lapangan pekerjaan lainnya. Sedangkan untuk lapangan pekerjaan yang jam kerjanya lebih kecil dianggap sebagai pekerjaan tambahan/pekerjaan sampingan.

Sedangkan bila seorang pekerja dalam seminggu yang lalu (dalam periode survei) sementara tidak bekerja (jam kerja =0 jam), maka pekerja tersebut tidak dikategorikan sebagai setengah pengangguran atau pengangguran terbuka. Pengecualian ini berlaku karena sebenarnya statusnya masih sebagai pekerja, tetapi karena selama pencacahan sedang cuti/sakit/menunggu panen/sebagainya, sehingga menyebabkan pekerja tersebut tidak melakukan aktifitas seperti biasanya.

Tabel 4.4
Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu dan Jenis Kelamin Tahun 2012 - 2013

Jam Kerja	2012	2013		
	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
< 10 Jam	0,92	1,21	3,92	2,12
10 - 34 Jam	7,80	7,38	10,98	8,60
≥ 35 Jam	91,29	91,41	85,10	89,28
Total	100	100	100	100

Sumber : Sakernas Tahun 2012 - 2013

Distribusi penduduk yang bekerja berdasarkan kelompok jam kerja digambarkan dalam Tabel 4.4. Secara global, bila dikelompokkan dalam jam kerja normal (35 jam seminggu), pada tahun 2013 sebanyak 89,28 persen pekerja memiliki jam kerja diatas 35 jam seminggu. Jam kerja antara 10–34 jam dalam seminggu ada 8,60 persen dan jam kerja seminggu kurang dari 1 jam ada 2,12 persen. Penduduk yang jam kerjanya kurang dari jam kerja

normal (35 jam seminggu) inilah yang disebut sebagai ***setengah pengangguran***.

Bila dilihat menurut jenis kelamin, maka penduduk laki-laki yang bekerja dengan jam kerja normal persentasenya lebih besar dibanding perempuan, yaitu 91,41 persen berbanding 85,10 persen. Sebaliknya pada mereka yang tergolong setengah pengangguran, pekerja wanita lebih mendominasi dibanding laki-laki, yaitu 10,98 persen pekerja perempuan berbanding 7,38 persen pekerja laki-laki.

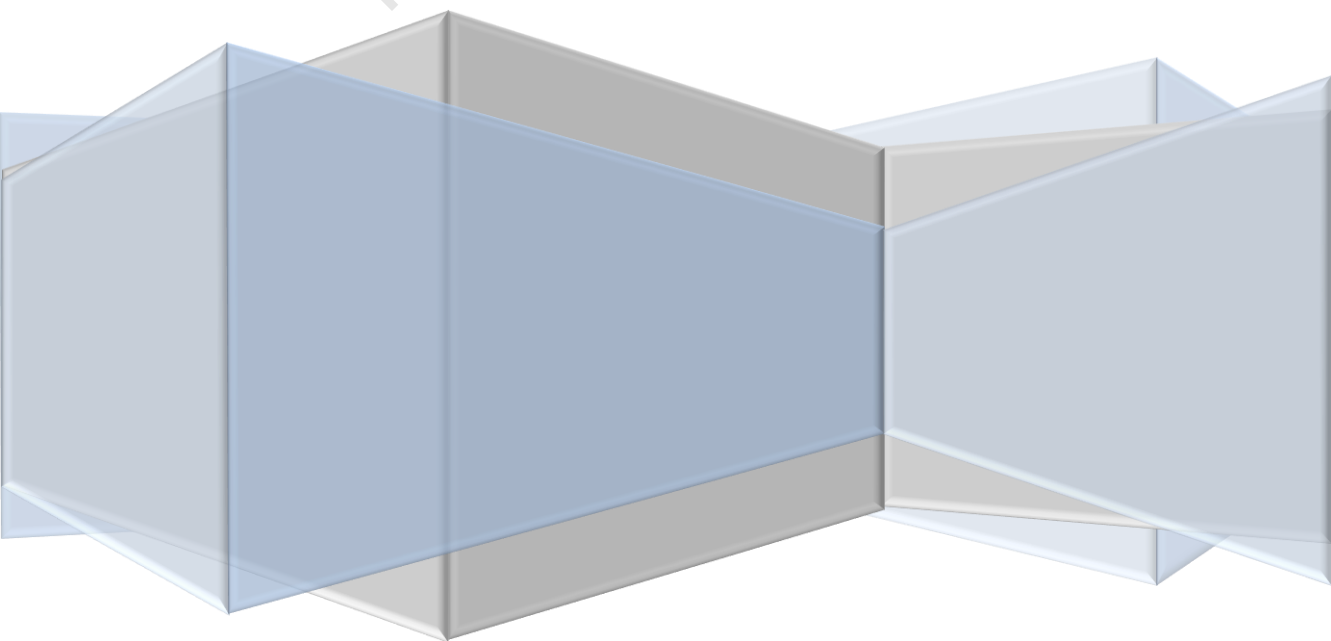
Bila dibandingkan antara tahun 2012 dan tahun 2013 terlihat bahwa jumlah pekerja di Kota Tangerang Selatan yang bekerja sesuai jam kerja normal ada sedikit penurunan yaitu sebesar 2,01 persen dimana pada tahun 2012 sebesar 91,29 persen turun menjadi menjadi 89,28 tahun 2013. Sebaliknya pekerja yang tergolong setengah pengangguran yaitu yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu terjadi kenaikan yaitu sebesar 0,80 persen di mana pada tahun 2012 sebesar 7,80 persen naik menjadi 8,60 persen tahun 2013.

BAB V

KEMISKINAN DAN POLA

KONSUMSI

<http://tangselkon.bps.go.id>



Kemiskinan di negara berkembang seperti Indonesia pada umumnya mengarah pada kemiskinan absolut, yaitu ketidakmampuan seseorang untuk mencapai standar hidup minimal tertentu yang telah ditetapkan. Walaupun pemerintah telah banyak menggulirkan berbagai program yang menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan, namun masih ada beberapa yang dianggap belum tepat sasaran, bahkan gagal dalam mengentaskan kemiskinan. Beberapa program dianggap belum menyentuh masalah mendasar yang terjadi pada masyarakat sehingga hasilnya tidak efektif. Selain itu, program yang ada juga dinilai masih bersifat reaktif, jangka pendek dan parsial.

Tabel 5.1
Indikator Kemiskinan Kabupaten Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2012

Kabupaten	Persentase Penduduk Miskin (P0)	Indeks Kedalaman (P1)	Indeks Keparahan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab. Pandeglang	9.27	1.27	0.32	217.081
Kab. Lebak	8.62	1.27	0.27	211.227
Kab. Tangerang	5.71	0.76	0.20	326.724
Kab. Serang	5.28	0.79	0.17	218.282
Kota Tangerang	5.55	0.65	0.12	375.341
Kota Cilegon	3.81	0.58	0.13	278.211
Kota Serang	5.69	0.77	0.17	231.020
Kota Tangerang Selatan	1.33	0.14	0.03	366.605
Banten	5.71	0.95	0.28	251.161

Sumber : BPS Provinsi Banten

Berdasarkan tabel 5.1 terlihat bahwa pada tahun 2012 persentase penduduk miskin di Kota Tangerang Selatan sebesar 1,33 persen. Bila dibandingkan dengan Kabupaten atau Kota lainnya di Provinsi Banten maka Kota Tangerang Selatan adalah yang paling kecil. Terkecil kedua adalah Kota

Cilegon sebesar 3,81 persen, Kabupaten Serang sebesar 5,28 persen dan Kota Tangerang sebesar 5,55 persen. Sedangkan yang paling banyak persentase penduduk miskinnya adalah Kabupaten Pandeglang sebesar 9,27 persen, Kabupaten Lebak sebesar 8,62 persen dan Kabupaten Tangerang sebesar 5,71 persen. Tetapi bila dilihat dari nilai rupiah yang dibutuhkan seseorang dalam sebulan untuk memenuhi kebutuhannya, yang paling besar adalah Kota Tangerang yaitu sebesar Rp. 375.341, disusul Kota Tangerang Selatan sebesar Rp. 366.605, Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 326.724 dan Kota Cilegon sebesar Rp. 278.211. Sedangkan yang paling kecil adalah Kabupaten Lebak yaitu sebesar Rp. 211.277, Kabupaten Pandeglang sebesar Rp. 217.081 dan Kabupaten Serang sebesar Rp. 218.282

Tabel 5.2
Indikator Kemiskinan Kabupaten Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2013

Kabupaten	Persentase Penduduk Miskin (P0)	Indeks Kedalaman (P1)	Indeks Keparahan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab. Pandeglang	10,25	1,39	0,33	230.364
Kab. Lebak	9,50	1,26	0,24	214.047
Kab. Tangerang	5,78	0,82	0,18	335.291
Kab. Serang	5,02	0,58	0,10	218.862
Kota Tangerang	5,26	0,58	0,10	398.513
Kota Cilegon	3,99	0,32	0,05	295.100
Kota Serang	5,92	0,72	0,14	236.039
Kota Tangerang Selatan	1,75	0,22	0,04	378.303
Banten	5,89	1,02	0,29	288.733

Sumber : BPS Provinsi Banten

Dari tabel 5.2 terlihat bahwa persentase penduduk miskin pada tahun 2013 Kota Tangerang Selatan sebesar 1,75 persen. Bila dibandingkan dengan Kabupaten atau Kota lainnya di Provinsi Banten maka Kota Tangerang Selatan adalah yang paling sedikit. Paling sedikit kedua adalah Kota Cilegon

sebesar 3,99 persen, kemudian Kabupaten Serang sebesar 5,02 persen dan Kota Tangerang sebesar 5,26 persen. Sedangkan yang paling banyak persentase penduduk miskinnya adalah Kabupaten Pandeglang sebesar 10,25 persen, Kabupaten Lebak sebesar 9,50 persen dan Kabupaten Tangerang sebesar 65,78 persen. Tetapi bila dilihat dari nilai rupiah yang dibutuhkan seseorang dalam sebulan untuk memenuhi kebutuhannya, yang paling besar adalah Kota Tangerang yaitu sebesar Rp. 398.513, disusul Kota Tangerang Selatan sebesar Rp. 378.303, Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 335.291 dan Kota Cilegon sebesar Rp. 295.100. Sedangkan yang paling kecil adalah Kabupaten Lebak yaitu sebesar Rp. 214.047, Kabupaten Serang sebesar Rp. 218.862, Kabupaten Pandeglang sebesar Rp. 230.364 dan Kota Serang sebesar Rp. 236.039. Bila dibandingkan dengan Garis Kemiskinan Provinsi Banten maka ada 4 wilayah yang berada dibawah rata-rata Provinsi yaitu Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak.

Bila dibandingkan antara tahun 2012 dan tahun 2013 terlihat bahwa persentase penduduk miskin mengalami kenaikan hampir di semua Kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten kecuali Kabupaten Serang dan Kota Tangerang.. Kenaikan persentase penduduk miskin terbesar adalah Kabupaten Pandeglang naik sebesar 0,98 persen, pada tahun 2012 sebesar 9,27 persen naik menjadi 10,25 persen pada tahun 2013, Kabupaten Lebak naik 0,88 persen, tahun 2012 sebesar 8,62 persen naik menjadi 9,50 persen tahun 2013 dan Kota Tangerang Selatan naik 0,42 persen, pada tahun 2012 sebesar 1,33 persen naik menjadi 1,75 persen tahun 2013. Sebaliknya wilayah yang mengalami penurunan persentase penduduk miskin adalah Kabupaten Serang dan Kota Tangerang. Pada tahun 2012 di Kabupaten Serang persentase penduduk miskin sebesar 5,28 persen turun menjadi 5,02 persen tahun 2013 (turun 0,26 persen) dan Kota Tangerang persentase

penduduk miskin tahun 2012 sebesar 5,55 persen turun menjadi 5,26 persen tahun 2013 (turun 0,29 persen)

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat **Kedalaman** kemiskinan (P1) dan tingkat **Keparahan** kemiskinan (P2).

Tingkat kedalaman kemiskinan yang digambarkan oleh angka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas kemiskinan, di mana semakin tinggi nilai indeks ini maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, atau dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk. Sedangkan angka Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri, dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Semakin tinggi angka indeks ini maka sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu semakin timpang dan sebaliknya.

Tingkat kedalaman kemiskinan (P1) di Kota Tangerang Selatan tahun 2013 sebesar 0,22, Kota Cilegon sebesar 0,32, Kota Tangerang dan Kabupaten Serang sama yaitu sebesar 0,58, sedangkan Provinsi Banten sebesar 1,02, sedangkan yang terbesar adalah Kabupaten Pandeglang sebesar 1,39, Kabupaten Lebak sebesar 1,26 dan Kabupaten Tangerang sebesar 0,82. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Tangerang Selatan tingkat kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap batas

kemiskinan, lebih baik dibanding Kabupaten/Kota lain di Provinsi Banten. Demikian juga bila dilihat dari Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2), bahwa Kota Tangerang Selatan tahun 2012 lebih baik dibanding Kabupaten/Kota lainnya yaitu sebesar 0,01, selanjutnya Kabupaten Serang sebesar 0,12 dan Kota Cilegon 0,17 sedangkan Provinsi Banten 0,22.

Dari tabel 5.2 terlihat bahwa Tingkat kedalaman kemiskinan (P1) di Kota Tangerang Selatan tahun 2013 sebesar 0,14, Kota Cilegon sebesar 0,58 dan Kota Tangerang sebesar 0,65, sedangkan Provinsi Banten sebesar 0,95, sedangkan yang terbesar masih Kabupaten Pandeglang sebesar 1,27, Kabupaten Lebak juga 1,27 dan Kabupaten Serang sebesar 0,79. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Tangerang Selatan tingkat kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap batas kemiskinan, lebih baik dibanding Kabupaten/Kota lain di Provinsi Banten. Demikian juga bila dilihat dari Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2), bahwa Kota Tangerang Selatan tahun 2013 lebih baik dibanding Kabupaten/Kota lainnya yaitu sebesar 0,03, selanjutnya Kota Tangerang sebesar 0,12 dan Kota Cilegon 0,13 sedangkan Provinsi Banten 0,28.

Bila dilihat perkembangannya tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 persentase penduduk miskin hampir semua kabupaten dan kota diwilayah Provinsi Banten mengalami kenaikan kecuali Kabupaten Serang dan Kota Tangerang, tetapi bila dilihat tingkat Kedalaman kemiskinan (P1) dan tingkat Keparahan kemiskinan (P2) dari tabel 5.1 dan tabel 5.2 terlihat bahwa ada 4(empat) wilayah yang mengalami kenaikan angka indeksnyanya kedalamannya (P1). Hal ini menunjukkan bahwa diwilayah tersebut terjadi kesenjangan yang lebih lebar yaitu di Kabupaten Pandeglang tahun 2012 tingkat Kedalaman kemiskinan sebesar 1,27 naik menjadi 1,39 tahun 2013 (naik 0,12), Kabupaten Tangerang dari 0,76 tahun 2012 naik menjadi 0,82 tahun 2013

(naik 0,06) dan Kota Tangerang Selatan pada tahun 2012 sebesar 0,14 naik menjadi 0,22 tahun 2013 (naik 0,08) serta Provinsi Banten tahun 2012 sebesar 0,95 menjadi 1,02 tahun 2013 (naik 0,07).

Demikian juga untuk tingkat Keparahan kemiskinan (P2) diwilayah tersebut juga mengalami kenaikan angka indeksinya kecuali Kabupaten Tangerang yang mengalami penurunan. Hal ini menggambarkan bahwa diwilayah tersebut penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin semakin tidak merata. Pada tahun 2012 tingkat Keparahan kemiskinan (P2) di Kabupaten Pandeglang sebesar 0,32 menjadi 0,33 tahun 2013 (naik 0,01), Kota Tangerang Selatan tahun 2012 sebesar 0,03 menjadi 0,04 tahun 2013 (naik 0,01) dan Provinsi Banten tahun 2012 sebesar 0,28 menjadi 0,29 tahun 2013 (naik 0,01). Sedangkan di 5 (lima) kabupaten dan kota lainnya kesenjangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin berkurang. Ini menunjukkan bahwa diwilayah tersebut pengeluaran penduduk miskinnya lebih merata. Kota Cilegon adalah kota yang paling besar penurunan angka indeks keparahannya (P2) yaitu sebesar 0,13 tahun 2012 turun menjadi 0,05 tahun 2013 (turun 0,08), kemudian Kabupaten Serang tahun 2012 sebesar 0,17 turun menjadi 0,10 tahun 2013 (turun 0,07), Kabupaten Lebak dan Kota Serang turun 0,03, sedangkan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang turun 0,02.

Selain tingkat kedalaman (P1) dan keparahan kemiskinan (P2), pola konsumsi masyarakat juga merupakan salah satu indikator sosial ekonomi masyarakat. Pola konsumsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat serta pendapatan. Budaya setempat dan perilaku lingkungan akan membentuk pola kebiasaan tertentu pada sekelompok masyarakat dimana mereka berada. Pendapatan seseorang akan mempengaruhi pola konsumsinya. Dengan menggunakan data pengeluaran

dapat terlihat pola konsumsi rumah tangga secara umum melalui indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan nonmakanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran dalam menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Pada umumnya makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat kesejahteraan penduduk.

Pada kelompok penduduk dengan tingkat pendapatan rendah biasanya pengeluaran akan lebih difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan. Penduduk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan standar minimum tertentu biasanya dikategorikan sebagai penduduk miskin. Di Indonesia, penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya (didekati dengan pengeluaran) tidak mencukupi untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Standar kebutuhan hidup layak sesuai hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978 diterjemahkan sebagai suatu jumlah rupiah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi makanan setara 2.100 kalori sehari, ditambah sejumlah pengeluaran untuk bukan makanan seperti perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan dan lainnya. Jumlah uang tersebut kemudian dikatakan sebagai batas **garis kemiskinan**. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu wilayah mencerminkan tingkat pendapatan penduduk, semakin banyak jumlah penduduk miskin mengindikasikan rendahnya tingkat pendapatan penduduk di wilayah tersebut.

Ukuran kesejahteraan masyarakat di suatu daerah dapat dilihat dengan menggunakan tingkat pendapatan masyarakat di wilayah tersebut. Sesungguhnya tingkat pendapatan dapat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Pendapatan yang rendah, tentunya mempersempit pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga pada kelompok masyarakat dengan

penghasilan terbatas, pemenuhan konsumsi yang bersifat primer (makanan) menjadi pilihan alternatif yang utama. Sulit bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat sekunder seperti: rekreasi, membeli barang-barang penunjang hobby. Dengan keterbatasan penghasilan itu pula yang dapat mempengaruhi rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Pada umumnya data yang menunjukkan pendapatan masyarakat sangat sulit untuk diperoleh. Sehingga pengeluaran, dalam hal ini pengeluaran rumah tangga merupakan *proxy* (pendekatan) dari pendapatan. Pengeluaran rumahtangga dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Biasanya pengeluaran makanan dapat mencapai titik jenuh, sementara pengeluaran untuk non makanan hampir tidak terbatas. Tarik-menarik antara dua pengeluaran tersebut dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin besar pengeluaran untuk non makanan dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan yang semakin baik karena bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya selain makanan seperti pendidikan, kesehatan bahkan rekreasi serta kebutuhan lainnya. Argumentasi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan maka akan semakin kecil porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan. Sebaliknya semakin tinggi pendapatan maka akan semakin tinggi pula porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk non makanan. Menurut kajian beberapa literatur, tingkat kesejahteraan dikatakan meningkat bila pengeluaran untuk non makanan sudah lebih dari 60 persen.

Mengamati data hasil Susenas 2013 Kota Tangerang Selatan seperti yang tersaji pada Tabel 5.3, terlihat bahwa proporsi rata-rata pengeluaran perkapita penduduk Kota Tangerang Selatan untuk kelompok makanan mencapai 40,35 persen dari total pengeluaran. Sedangkan proporsi rata-rata

pengeluaran untuk kelompok bukan makanan sekitar 59,65 persen. Atau dalam bentuk besaran rupiah rata-rata pengeluaran untuk konsumsi makanan sebesar Rp 534.254 sedangkan untuk konsumsi bukan makanan sebesar Rp1789.822, dengan total pengeluaran perkapita sebulan sebesar Rp 1.324.076. Ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Tangerang Selatan pada umumnya mengalami penurunan. Seperti kita ketahui bahwa pada tahun 2013 ada kenaikan harga BBM yang mengakibatkan berkurangnya daya beli masyarakat khususnya ekonomi menengah kebawah.

Tabel 5.3
Pengeluaran Rata-rata Perkapita Perbulan Penduduk
Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 - 2013

Jenis Pengeluaran	2012		2013	
	Pengeluaran (Rp)	Persentase (%)	Pengeluaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Pengeluaran makanan	574.095	32,94	534 254	40,35
1. Padi-padian	49.782	2.83	48 129	3,63
2. Telur dan susu	38.135	2.17	43 222	3,26
3. Makanan dan minuman jadi	205.148	11.66	207 460	15,67
4. Tembakau dan sirih	68.905	3.92	48 636	3,67
5. Lainnya	212.125	12.06	186 808	14,11
B. Pengeluaran bukan makanan	1.184.986	67.36	789 822	59,65
1. Perumahan	366.764	20.85	333 946	25,22
2. Aneka barang dan jasa	282.730	16.07	317 807	24,00
3. Biaya pendidikan	69.287	3.94	81 816	6,18
4. Biaya kesehatan	28.893	1.65	34 863	2,63
5. Lainnya	437.223	24.86	21 389	1,62
Jumlah	1.759.081	100	1 324 076	100

Sumber: Susenas Tahun 2012-2013.

Bila melihat komposisi jenis pengeluaran untuk kelompok makanan, maka rata-rata pengeluaran terbesar adalah makanan dan minuman jadi,

yaitu sebesar Rp. 207.460 (15,67 persen) disusul kelompok lainnya, yaitu sebesar Rp. 186.808 (14,11 persen) dari total pengeluaran. Kemudian diikuti oleh tembakau dan sirih sebesar Rp. 48.636 (3,67 persen), padi-padian sebesar Rp. 48.129 (3,63 persen), serta telur dan susu sebesar Rp. 43.222 (3,26 persen). Sedangkan pada kelompok bukan makanan, rata-rata pengeluaran terbesar adalah untuk pengeluaran perumahan sebesar Rp. 333.946 (25,22 persen) diikuti kelompok aneka barang dan jasa sebesar Rp. 317.807 (24,00) kemudian pengeluaran biaya pendidikan sebesar Rp. 81.816 (6,18 persen), pengeluaran biaya kesehatan sebesar Rp. 21.389 (2,63 persen) dan biaya lainnya sebesar Rp. 21.389 (1,62 persen) dari total pengeluaran.

Bila dibandingkan dengan pola konsumsi tahun 2012 maka terjadi penurunan pengeluaran rata-rata perkapita, penurunan yang cukup berarti terutama pengeluaran non makanan dimana tahun 2012 sebesar Rp. 1.184.986 atau 67,36 persen dari total pengeluaran turun menjadi Rp. 789.822 atau 59,65 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Kota Tangerang Selatan tahun 2013 terjadi penurunan bila dibandingkan tahun 2012 salah satunya karena adanya kenaikan BBM oleh pemerintah pusat yang mengakibatkan kenaikan harga barang kebutuhan baik makanan maupun non makanan.

Pola konsumsi penduduk suatu wilayah selain dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan penduduknya. Semakin tinggi tingkat pendapatannya akan semakin rendah proporsi pengeluaran makanannya. Sebaliknya semakin rendah tingkat pendapatannya akan semakin tinggi proporsi pengeluaran makanannya.

Tabel 5.4
 Persentase Penduduk Menurut Rata-rata Pengeluaran Perkapita
 Perbulan Dirinci Per Kabupaten/Kota Tahun 2013

Kabupaten/Kota	Persentase Rata-rata Golongan Pengeluaran Perkapita (%)						
	Kurang dari Rp. 200.000	200.000 – 299.999	300.000 – 499.999	500.000 – 749.999	750.000 – 999.999	1.000. 000 ke atas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kab. Pandeglang	4,84	7,14	10,44	16,28	23,60	37,71	100,00
Kab. Lebak	8,59	6,67	9,76	15,73	22,41	36,84	100,00
Kab. Tangerang	4,63	6,51	10,35	15,56	21,66	41,30	100,00
Kab. Serang	4,71	6,54	9,86	15,46	21,98	41,45	100,00
Kota Tangerang	0,00	6,62	9,81	15,37	21,25	46,95	100,00
Kota Cilegon	0,00	6,78	10,09	15,38	22,42	45,33	100,00
Kota Serang	4,76	6,70	9,85	15,33	21,52	41,84	100,00
Kota Tangerang Selatan	0,00	0,79	7,85	20,14	15,04	56,18	100,00
Prov. Banten	7,73	6,09	9,25	14,36	20,17	42,39	100,00

Sumber : Susenas 2013

Pada tabel 5.4 terlihat bahwa persentase rata-rata golongan pengeluaran perkapita perbulan penduduk di Kota Tangerang Selatan terbanyak ada pada golongan pengeluaran Rp. 1.000.000 ke atas yaitu sebesar 56,18 persen. Disusul golongan pengeluaran Rp. 500.000 – Rp. 749.999 sebesar 20,14 persen dan golongan pengeluaran Rp. 750.00 – Rp. 999.999 sebesar 15,04 persen. Persentase rata-rata golongan pengeluaran perkapita perbulan penduduk di Kota Tangerang Selatan terkecil ada pada golongan pengeluaran Rp. 200.000 – Rp. 299.999 sebesar 0,79 persen sedangkan persentase penduduk dengan golongan pengeluaran perkapita perbulan dibawah Rp 200.000 tidak ada.

Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Banten dari tabel 5.4 terlihat bahwa persentase rata-rata golongan pengeluaran perkapita perbulan untuk penduduk yang pengeluarannya Rp. 1.000.000 keatas, tertinggi adalah Kota Tangerang Selatan sebesar 56,18 persen. Diikuti Kota Tangerang sebesar 46,95 persen, Kota Cilegon sebesar 45,33 persen dan Kota Serang sebesar 41,84 persen. Sedangkan persentase terendah adalah Kabupaten Pandeglang sebesar 37,71 persen dan Kabupaten Lebak sebesar 36,84 persen.

Tetapi untuk persentase rata-rata golongan pengeluaran perkapita perbulan untuk penduduk yang pengeluarannya Rp. 750.000 – Rp. 999.999 persentase tertinggi adalah Kabupaten Pandeglang yaitu sebesar 23,60 persen. Diikuti Kota Cilegon Selatan sebesar 22,42 persen, Kabupaten Lebak sebesar 22,41 persen, Kabupaten Serang sebesar 21,98 persen dan Kabupaten Tangerang sebesar 21,66 persen dan Kota Serang sebesar 21,25 persen. Persentase terendah adalah Kota Tangerang sebesar 21,25 persen dan Kota Tangerang Selatan sebesar 15,04 persen.

Sebaliknya untuk persentase rata-rata golongan pengeluaran perkapita perbulan penduduk untuk golongan pengeluaran kurang dari Rp. 200.000 -299.999 persentase terbesar ada di Kabupaten Lebak yaitu sebesar 8,59 persen diikuti Kabupaten Pandeglang sebesar 4,84 persen diikuti oleh Kota Serang sebesar 4,76 persen, Kabupaten Serang sebesar 4,71 persen, dan Kabupaten Tangerang sebesar 4,63 persen sedangkan 3 kota lainnya yaitu Kota Tangerang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan tidak ada persentase penduduk yang pengeluaran rata-rata perkapitanya kurang dari Rp. 200.000 perbulan.

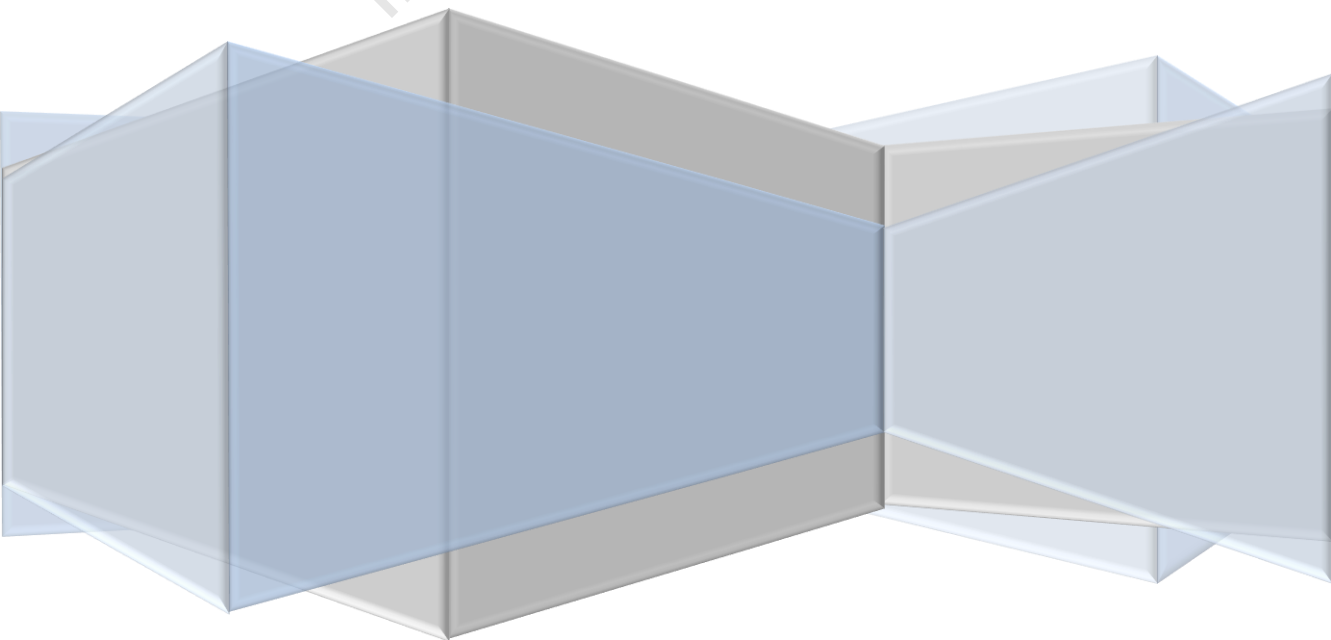
Hal tersebut menunjukkan bahwa diwilayah perkotaan yaitu Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Cilegon tingkat pendapatan

penduduknya relatif lebih tinggi dibanding daerah Kabupaten lainnya di Provinsi Banten. Ini juga mengindikasikan bahwa rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh penduduk daerah perkotaan untuk memenuhi kebutuhannya relatif lebih mahal dibanding daerah pedesaan. Tetapi bila dilihat dari penyebaran persentase rata-rata golongan pengeluaran perkapita yang sangat timpang adalah Kota Tangerang Selatan dimana lebih dari setengahnya ada pada golongan rata-rata pengeluaran perkapita perbulan Rp. 1.000.000 keatas, sebaliknya untuk golongan rata-rata pengeluaran perkapita kurang dari Rp. 200.000 perbulan tidak ada.

BAB VI

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

<http://kangselkota.bps.go.id>



Salah satu kebutuhan dasar manusia selain pangan dan sandang adalah papan atau hunian tempat tinggal. Selain sebagai tempat berlindung dan mempertahankan diri dari kondisi lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial, rumah juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berbanding lurus dengan kualitas/kondisi rumahnya. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan akan perumahanpun semakin meningkat. Namun keterbatasan lahan untuk pemukiman dan penawaran perumahan yang hanya tertuju pada suatu golongan masyarakat tertentu merupakan kendala bagi sebagian besar masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan perumahan. Hal lain yang menjadi permasalahan adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membangun perumahan yang layak huni, sementara tingkat pendapatan penduduk masih relatif rendah. Akibatnya adalah masih tingginya jumlah rumah tangga/penduduk yang menempati rumah tidak layak huni, baik dilihat dari sisi kualitas rumah, lingkungan, kesehatan maupun ukuran luasnya. Hal ini perlu mendapat perhatian mengingat kualitas sumber daya manusia yang akan datang akan sangat dipengaruhi oleh kualitas perumahan dan permukiman di mana masyarakat tinggal menempatinnya.

Berbagai fasilitas perumahan yang mencerminkan kesejahteraan rumah tangga tersebut diantaranya dapat dilihat dari kualitas material yang mencakup antara lain jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan. Kualitas ketiga unsur tersebut secara umum dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Selain itu, berbagai indikator fasilitas penunjang lain seperti sumber air minum, luas lantai hunian, tempat buang

air besar, sumber penerangan dan status kepemilikan rumah juga dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2013, sekitar 75,90 persen rumah tangga di Kota Tangerang Selatan sudah menempati rumah milik sendiri/orang tua/saudara. Sedangkan sisanya sebesar 24,10 persen rumah tangga masih menempati rumah sewa/kontrak ataupun rumah dinas/bebas sewa. Masih tingginya rumah tangga yang menempati rumah sewa/kontrak tidak terlepas dari daya tarik Kota Tangerang Selatan sebagai wilayah perkotaan yang sedang berkembang pesat sehingga mampu menarik penduduk dari wilayah lain untuk datang, terutama dengan tujuan bekerja. Namun demikian, tingginya harga lahan/properti menyebabkan para pendatang tersebut hanya mampu menyewa tempat tinggal.

Tetapi bila dilihat perkembangannya dari tahun sebelumnya maka persentase rumah tangga yang memiliki rumah sendiri/orang tua/saudara tahun 2013 mengalami penurunan yaitu sebesar 6,14 persen, dimana tahun 2012 sebesar 82,04 persen turun menjadi 76,47 persen tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan penduduk Kota Tangerang Selatan semakin berkurang dengan berkurangnya rumah tangga yang mempunyai rumah sendiri/orang tua/saudara.

Kriteria rumah yang layak dan sehat untuk dijadikan tempat tinggal adalah apabila rumah tersebut memiliki dinding terluas yang terbuat dari

tembok atau kayu, atap terluas berupa beton atau genteng serta luas lantai terluas bukan berupa tanah. Selain itu menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah yang memiliki luas lantai per orang minimal 10m². Sedangkan menurut Pedoman Umum Rumah Sederhana Sehat, kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktifitas dasar manusia di dalam rumah yang meliputi; tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci, masak dan ruang gerak lainnya. Sementara menurut Kementerian Kesehatan, salah satu persyaratan rumah sehat adalah jika penguasaan luas lantai perkapitanya minimal 8 m². Jika melihat hasil kajian, maka kebutuhan ruang per orang adalah 9 m² dengan perhitungan rata-rata ketinggian langit-langit adalah 2,80 m.

Tabel 6.1

Indikator Fasilitas Perumahan Kota Tangerang Selatan Tahun 2013-2013

Indikator Fasilitas Perumahan	Persen	
	2013	2013
(1)	(2)	(3)
Rumah milik sendiri/orang tua/saudara	82,04	76,47
Lantai terluas bukan tanah	99,25	99,85
Luas lantai rumah perkapita < 10 m ²	18,08	16,37
Atap rumah dari beton dan genteng	82,17	82,88
Dinding rumah berupa tembok	99,13	97,80
Mengonsumsi air minum kemasan dan air ledeng	48,88	52,38
Bahan bakar memasak:		
- Gas	97,76	98,23
- Minyak tanah	1,37	0,09
- Kayu bakar	0,25	0,19
- Lainnya	0,62	1,49
Menggunakan fasilitas buang air besar	99,75	99,95
Menggunakan Listrik PLN dan nonPLN	99,84	100

Sumber : Susenas Tahun 2013 - 2013

Dari tabel 6.1 terlihat bahwa masih terdapat sekitar 16,37 persen rumah tangga di Kota Tangerang Selatan yang penguasaan luas lantai rumah perkapitanya kurang dari 10 m². Jika rata-rata jumlah anggota rumah tangga di Kota Tangerang Selatan sebanyak 4,1 jiwa per rumah tangga, maka luas minimal sebuah rumah sehat menurut WHO adalah seluas 41 m². Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka rumah tangga yang luas lantai perkapitanya kurang dari 10 m² terjadi penurunan sebesar 1,71 persen. Sementara itu persentase rumah tangga dengan lantai terluas yang masih berupa tanah masih ada walaupun kurang dari 1 (satu) persen yaitu sebesar 0,15 persen.

Indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk rumah tinggal adalah penggunaan atap dan dinding terluas. Pada tahun 2013, persentase rumah tinggal dengan atap terluas berupa beton atau genteng di Kota Tangerang Selatan mencapai 82,88 persen (naik 0,71 persen) dibanding tahun 2012. Bila dilihat dari dinding terluasnya maka hampir seluruhnya rumah tangga di Kota Tangerang Selatan menggunakan dinding berupa tembok yaitu sebesar 97,80 persen (turun 1,33 persen) dibanding tahun 2012.

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah tinggal akan menentukan kualitas dan nyaman tidaknya rumah tinggal tersebut. Salah satu fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya air bersih serta jamban yang dimiliki sendiri. Ketersediaan air bersih dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan oleh pemerintah. Seperti terlihat pada Tabel 6.1, persentase rumah tangga yang mengkonsumsi air minum kemasan dan air ledeng sebagai sumber air minum dan masak sekitar 52,38

persen (naik 3,50 persen) dibanding tahun 2012. Selebihnya masih menggunakan sumber air dari sumur bor/ pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, mata air tak terlindung, air sungai, air hujan dan lainnya. Jadi masih lebih dari setengahnya penduduk di Kota Tangerang Selatan yang mengkonsumsi air selain air minum kemasan dan air ledeng.

Sistem pembuangan kotoran manusia sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan resiko penularan penyakit, khususnya penyakit saluran pencernaan. Klasifikasi sarana pembuangan kotoran dilakukan berdasarkan tingkat resiko pencemaran yang mungkin ditimbulkan. Masalah kondisi lingkungan tempat pembuangan kotoran manusia tidak terlepas dari aspek kepemilikan terhadap sarana yang digunakan terutama dikaitkan dengan tanggung jawab dalam pemeliharaan dan kebersihan sarana. Fasilitas rumah tangga yang berhubungan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2013, hampir seluruhnya rumah tangga di Kota Tangerang Selatan menggunakan fasilitas buang air besar yaitu sebesar 99,95 persen (naik 0,20 persen) dibanding tahun 2012. Ini menunjukkan bahwa dari 1000 rumah tangga di Kota Tangerang Selatan masih ada sekitar 1 rumah tangga yang tidak menggunakan jamban.

Fasilitas perumahan lainnya yang juga penting adalah penerangan dan bahan bakar untuk memasak. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan NonPLN), karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Hasil Susenas tahun 2013 menunjukkan bahwa seluruh penduduk di Kota Tangerang Selatan sudah menggunakan Listrik. Sementara itu persentase rumah tangga yang menggunakan bahan bakar gas untuk memasak sebesar 98,23 persen (naik

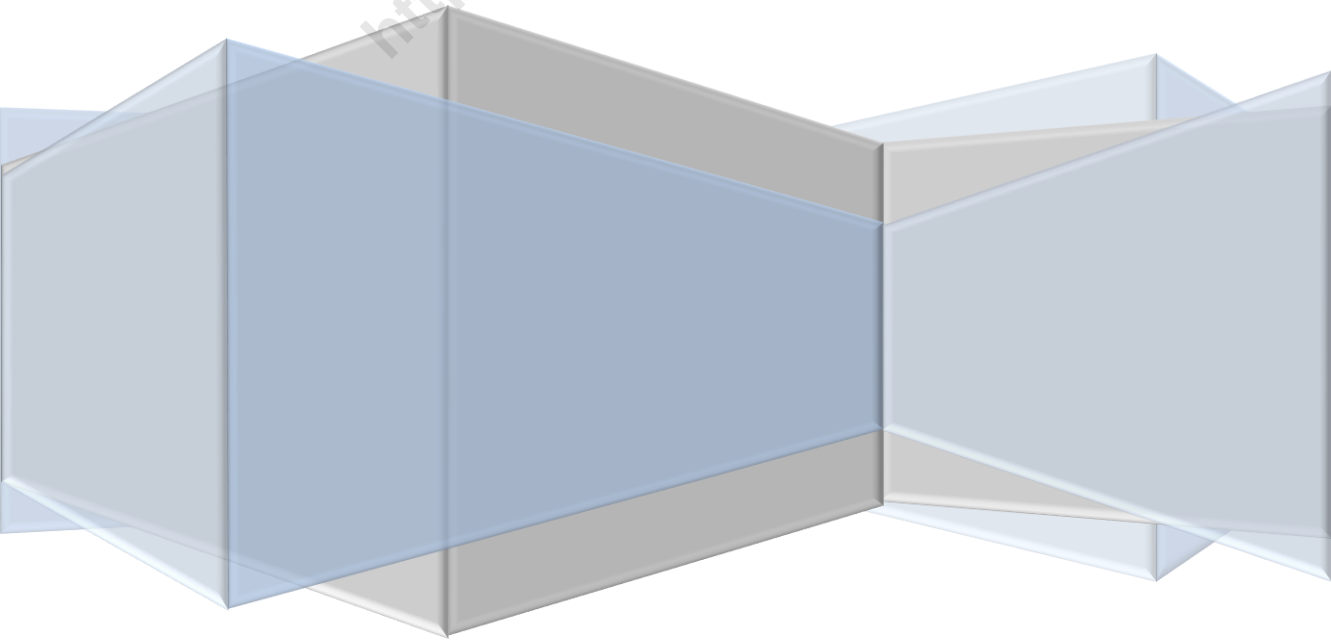
sebesar 0,47 persen) dibanding tahun 2012. Demikian juga untuk pemakaian minyak tanah, kayu bakar mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya tetapi untuk bahan bakar lainnya mengalami peningkatan sebesar 0,87 persen dimana mereka tidak menggunakan bahan bakar tetapi menggunakan Magic Com atau sejenisnya untuk menanak nasi ataupun mereka yang tidak pernah memasak. . Informasi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.1.

<http://tangselkota.bps.go.id>

BAB VII

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

<http://tangserkota.bps.go.id>



Indikator Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Dikatakan cukup baik karena IPM merupakan indikator gabungan yang mencakup tiga indikator pembangunan yang dominan dan memiliki andil yang cukup besar dalam membentuk kualitas sumber daya manusia.

Tiga indikator penyusun IPM tersebut adalah:

- 1) Indikator Kesehatan yang digambarkan melalui Indeks Angka Harapan Hidup (AHH).
- 2) Indikator Pengetahuan yang digambarkan melalui Indeks Angka Melek Huruf (AMH) dan Indeks Rata-rata Lama Sekolah (MYS), dan
- 3) Indikator Ekonomi yang digambarkan melalui Indeks Kemampuan Daya Beli Masyarakat/*Purchasing Power Parity* (PPP).

Indikator penting tersebut terwujud dalam suatu ukuran pencapaian, yaitu “umur panjang dan sehat” yang diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir, “berpengetahuan dan berketerampilan” yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak yang diukur dengan pendapatan perkapita yang disesuaikan. Ketiga indikator tersebut dianggap dapat mengukur tingkat kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah.

Penghitungan IPM dengan menggunakan ketiga indikator tersebut di atas merupakan formula yang digunakan oleh UNDP (*United Nation Development Program*) sejak tahun 1990 untuk mengukur tingkat

pencapaian pembangunan manusia di suatu negara dan dipublikasikan dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR).

Tabel 7.1
Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM

Komponen IPM	Mak	Min	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai standar global (UNDP)
Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar global (UNDP)
Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)
Konsumsi per kapita yang disesuaikan (Rp)	732.720	300.000	UNDP menggunakan PDB perkapita riil yang disesuaikan

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan

7.1. Indikator Kesehatan

Dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara umum, angka harapan hidup waktu lahir (*life expectancy at birth*) dipilih sebagai salah satu komponen dalam penghitungan IPM untuk indikator bidang kesehatan. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penting dalam mengukur *longevity* (panjang umur) yang menggambarkan derajat kesehatan masyarakat suatu daerah, karena semakin baik kesehatan seseorang maka kecenderungan untuk hidup lebih lama semakin tinggi dan sebaliknya semakin buruk kesehatan seseorang maka kecenderungan hidupnya pun semakin pendek, hal ini tentunya tidak terlepas dari kekuasaan Tuhan.

Untuk menghitung angka harapan hidup digunakan metode tidak langsung dengan menggunakan dua data dasar, yaitu rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Prosedur penghitungan angka harapan hidup sejak lahir (*AHH0*) dilakukan dengan menggunakan Software *Mortpack Life*. Setelah mendapatkan angka harapan hidup sejak lahir, selanjutnya dilakukan penghitungan angka indeks (Indeks Kesehatan)

dengan cara membandingkan angka tersebut terhadap angka yang sudah distandarkan.

$$\text{Indeks AHHO} = \frac{\text{AHHO } t - \text{AHHO Min}}{\text{Sasaran Ideal} - \text{AHHO Min}}$$

Pada tahun 2013 angka harapan hidup penduduk Kota Tangerang Selatan sebesar 68,77. Angka ini menunjukkan bahwa setiap penduduk Kota Tangerang Selatan (bayi) yang lahir pada tahun 2013 mempunyai peluang/harapan untuk hidup selama 68,77 tahun. Dengan menggunakan rumus di atas akan didapat angka indeks harapan hidup sebesar 72,95. Indeks angka harapan hidup merupakan indeks penyusun IPM yang menggambarkan pembangunan manusia di bidang kesehatan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pencapaian pembangunan di bidang kesehatan baru mencapai 73,61 persen dari kondisi ideal. Angka indeks harapan hidup yang lebih besar dibandingkan tahun 2012 (72,95) menunjukkan tingkat kesehatan masyarakat Kota Tangerang Selatan semakin membaik.

7.2. Indikator Pengetahuan

Indeks pengetahuan disusun oleh dua indikator pendidikan, yaitu angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (MYS).

7.2.1. Angka Melek Huruf

Harkat dan martabat manusia akan meningkat diantaranya apabila yang bersangkutan cerdas. Hidup sehat dan cerdas diyakini akan meningkatkan kemampuan produktivitas seseorang sehingga akan meningkatkan mutu peran warga tersebut sebagai pelaku (*agent*) pembangunan. Tingkat kecerdasan (*intelligence*) seseorang pada titik waktu tertentu merupakan produk gabungan dari keturunan (*heredity*), pendidikan

dan pengalamannya. Perkembangan tingkat pendidikan salah satunya dapat dievaluasi dengan melihat besarnya indikator angka melek huruf (AMH).

AMH adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin. Batasan usia 15 tahun keatas hanya membatasi proporsi penduduk yang usianya dianggap telah cukup untuk belajar membaca dan menulis di sekolah. Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin merupakan nilai indeks dari AMH. Pada tahun 2013 angka melek huruf (indeks AMH) Kota Tangerang Selatan sebesar 98,62 persen. Artinya masih terdapat sekitar 2 jiwa dari setiap 100 penduduk usia diatas 15 tahun yang belum dapat membaca dan menulis.

7.2.2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) / *Mean Years of Schooling (MYS)*

Selain angka melek huruf, indikator penyusun indeks pengetahuan lainnya adalah rata-rata lama sekolah (RLS). AMH dan RLS diharapkan mencerminkan tingkat pengetahuan dan keterampilan penduduk.

$$RLS = \frac{\sum fi \times ji}{\sum fi}$$

Keterangan:

RLS = Rata-rata Lama Sekolah

fi = Frekuensi penduduk 15 tahun keatas pada jenjang pendidikan

j = Lama sekolah untuk masing-masing jenjang pendidikan yang ditamatkan atau tingkat pendidikan yang ditamatkan atau tingkat pendidikan yang pernah diduduki

i = Jenjang pendidikan

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah lamanya penduduk 15 tahun keatas bersekolah dibagi dengan jumlah penduduk usia

15 tahun keatas. Angka rata-rata lama sekolah dihitung dengan mengolah dua variabel secara simultan, yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah diduduki dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Penghitungan rata-rata lama sekolah dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, dihitung lama sekolah untuk masing-masing individu dengan menggunakan pola hubungan antar variabel, tahap selanjutnya dihitung indeks rata-rata lama sekolah dengan formula sebagai berikut.

$$\text{Indeks RLS} = \frac{\text{RLS 2013} - \text{RLS Min}}{\text{Sasaran Ideal} - \text{RLS Min}}$$

Pada tahun 2013 angka rata-rata lama sekolah penduduk Kota Tangerang Selatan adalah 10,99 tahun dan merupakan yang tertinggi jika dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten. Angka RLS yang melampaui angka wajib pendidikan dasar 9 tahun menunjukkan pembangunan di bidang pendidikan sudah terlaksana cukup baik. Dengan berpatokan sasaran ideal RLS adalah 15 tahun, maka didapat indeks RLS sebesar 73,27 persen. Dengan demikian dapat diartikan bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat Kota Tangerang Selatan baru mencapai 73,27 persen dari rata-rata lama sekolah ideal, yaitu 15 tahun.

7.2.3. Indeks Pengetahuan (Indeks AMH + Indeks RLS)

Indeks angka melek huruf dan indeks rata-rata lama sekolah digabung menjadi satu dengan perbandingan 2 : 1, sehingga diperoleh indeks pendidikan dengan formula sebagai berikut:

$$IP = \frac{2}{3} \text{Indeks AMH} + \frac{1}{3} \text{Indeks RLS}$$

Indeks pengetahuan akan bernilai antara 0 (kondisi terburuk) sampai dengan 100 (kondisi terbaik). Angka melek huruf dan rata-rata lama

sekolah dapat menggambarkan tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat suatu wilayah. Pada tahun 2013 angka indeks pengetahuan Kota Tangerang Selatan sebesar 90,18. Hal ini berarti pembangunan yang selama ini dilakukan baru membawa tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat Kota Tangerang Selatan mencapai 90,18 persen dari kondisi ideal (pencapaian maksimal).

7.3. Indikator Ekonomi

Indikator Ekonomi digambarkan melalui angka indeks tingkat daya beli masyarakat/*Purchasing Power Parity (PPP)*. Kemampuan daya beli merupakan kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup secara layak. Komponen standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. Sebagai catatan, UNDP menggunakan indikator PDB per kapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*) sebagai ukuran komponen tersebut karena tidak tersedia indikator lain yang lebih baik untuk keperluan perbandingan antar negara.

Dengan dimasukkannya variabel PPP kedalam penghitungan IPM, maka IPM jelas lebih "lengkap" dalam merefleksikan kondisi suatu masyarakat yang memiliki peluang hidup panjang dan sehat serta memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Namun demikian, UNDP melihat bahwa kondisi seperti itu belum memberikan gambaran yang ideal. Menurutnya, masyarakat ideal selain harus memiliki peluang hidup panjang dan sehat serta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, juga harus mempunyai peluang/kesempatan kerja/berusaha yang memadai sehingga akan memperoleh/menghasilkan sejumlah "uang" yang memiliki daya beli (*Purchasing Power*).

Penghitungan indikator konsumsi riil per kapita yang telah disesuaikan dilakukan melalui tahapan pekerjaan sebagai berikut :

1. Hitung pengeluaran konsumsi perkapita dari Susenas Modul (=A).
2. Mendeflasikan nilai A dengan IHK ibukota propinsi yang sesuai (=B).
3. Menghitung daya beli per unit (=PPP/unit). Metode penghitungan sama seperti metode yang digunakan *International Comparison Project* (ICP) dalam menstandarkan nilai PDB suatu negara. Data dasar yang digunakan adalah data harga dan kuantum dari suatu basket komoditi yang terdiri dari nilai beberapa komoditi yang telah ditentukan (27 komoditi) dan diperoleh dari Susenas Modul.
4. Membagi nilai B dengan PPP/unit (=C).
5. Menyesuaikan nilai C dengan formula Atkinson sebagai upaya untuk memperkirakan nilai *marginal utility* dari C.

Penghitungan PPP/unit dilakukan dengan rumus:

$$PPP/unit = \frac{\sum_j E(i,j)}{\sum_j (p_{(g,j)} \cdot q_{(i,j)})}$$

dimana,

$E_{(i,j)}$: pengeluaran untuk komoditi j di kabupaten ke-i

$p_{(g,j)}$: harga komoditi j tahun dasar IHK di DKI Jakarta

$q_{(i,j)}$: jumlah komoditi j (unit) yang dikonsumsi di kabupaten ke-i

Angka indeks tingkat daya beli (PPP) menunjukkan tingkat kemampuan daya beli masyarakat. Semakin besar angka indeks PPP maka semakin tinggi pula kesempatan masyarakat untuk dapat memenuhi standar kehidupan yang layak. Pada tahun 2013, angka konsumsi perkapita riil yang disesuaikan Kota Tangerang Selatan tercatat sebesar Rp 649.120. Dengan demikian,

maka indeks tingkat daya beli masyarakat Kota Tangerang Selatan mencapai 67,60. Angka tersebut mengindikasikan bahwa tingkat daya beli masyarakat Kota Tangerang Selatan sebagai jalan untuk memenuhi standar kehidupan yang layak baru mencapai 67,60 persen dari kondisi ideal.

Tabel 7.2
Indeks Komponen Penyusun IPM Kota Tangerang Selatan
Tahun 2013-2013

Komponen IPM	2013	2013
(1)	(2)	(3)
Indeks Angka Harapan Hidup	72,95	73,61
Indeks Pengetahuan	90,08	90,18
Indeks Tingkat Daya Beli	66,81	67,60

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan

7.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai alat ukur tingkat pencapaian pembangunan manusia, merupakan indeks gabungan dari tiga komponen 'penilai' kualitas sumber daya manusia. Jika ketiga komponen tersebut memiliki kualitas yang baik, maka secara otomatis sumber daya manusianya memiliki kualitas yang baik pula. Indeks pembangunan manusia menunjukkan seberapa besar tingkat pencapaian dari pembangunan yang telah dilakukan selama ini dari bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Nilai indeks pembangunan manusia adalah rata-rata dari ketiga indeks, yaitu indeks angka harapan hidup (AHH), indeks pengetahuan dan indeks tingkat daya beli (PPP).

$$IPM = \frac{\text{Indeks (Kesehatan + Pendidikan + Ekonomi)}}{3}$$

Tabel 7.3.
Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Komponen IPM dan
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten 2013-2013

Provinsi / Kab/Kota	AHH (thn)	AMH (%)	MYS (thn)	PPP (ribu Rp)	IPM		Peringkat IPM	
					2013	2013	2013	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
BANTEN	64,47	96,87	8,61	639,28	71,49	71,90	23	23
Pandeglang	64,35	96,78	7,04	633,32	69,22	69,64	7	7
Lebak	63,62	96,05	6,29	637,32	68,43	68,82	8	8
Tangerang	66,33	96,37	8,96	643,04	72,36	72,82	4	5
Serang	64,39	96,04	7,48	638,78	69,83	70,25	6	6
Kota Tangerang	68,56	98,48	10,07	652,08	75,72	76,05	3	3
Kota Cilegon	68,97	98,87	9,72	654,88	75,89	76,31	2	2
Kota Serang	66,65	97,35	8,59	645,47	72,30	73,12	5	4
Kota Tangsel	69,17	98,62	10,99	652,52	76,61	77,13	1	1

Sumber: BPS Provinsi Banten tahun 2013-2013

Secara keseluruhan, sebagaimana terlihat pada tabel 7.3, tingkat keberhasilan pembangunan manusia Kota Tangerang Selatan pada tahun 2013 yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang digambarkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) baru mencapai 77,13. Kondisi ini mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 2012 yang sebesar 76,61. Jika digolongkan menurut pencapaian skor, maka angka IPM Kota Tangerang Selatan pada tahun 2013 termasuk golongan angka IPM menengah atas.

Jika dibandingkan antar kabupaten/kota se-Provinsi Banten, maka pencapaian pembangunan manusia di Kota Tangerang Selatan pada tahun baik tahun 2012 maupun tahun 2013 berada pada peringkat pertama. Bila dilihat dari unsur komponen IPM, Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2013

di Kota Tangerang Selatan adalah yang paling tinggi dibanding Kabupaten atau Kota lainnya di Provinsi Banten yaitu sebesar 69,17, disusul Kota Cilegon sebesar 68,87 dan Kota Tangerang sebesar 68,56. Ini menunjukkan bahwa secara rata-rata umur harapan hidup penduduk di Kota Tangerang Selatan mendekati umur 69 tahun.

Sedangkan komponen kedua yaitu Angka Melek Huruf (AMH) di Provinsi Banten tertinggi adalah Kota Cilegon sebesar 98,87, diikuti oleh Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 98,62 dan Kota Tangerang sebesar 98,48. Ini menunjukkan bahwa di Kota Tangerang Selatan masih ada 1,38 persen penduduk yang buta huruf. Dalam kenyataannya memang masih ada penduduk usia lanjut yang tidak bisa baca tulis huruf latin.

Sedangkan komponen ketiga yaitu Rata-rata Lama Sekolah (MYS). Rata-rata Lama Sekolah (MYS) di Kota Tangerang Selatan adalah yang tertinggi dibanding kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Banten yaitu dengan angka indeks sebesar 10,99, disusul oleh Kota Tangerang sebesar 10,07, Kota Cilegon sebesar 9,72 dan Kabupaten Tangerang sebesar 8,96. Sedangkan yang terendah ada di Kabupaten Lebak sebesar 6,29 dan Kabupaten Pandeglang sebesar 7,04. Rata-rata lama sekolah di Kota Tangerang Selatan sebesar 10,99 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk di Kota Tangerang Selatan hampir 11 tahun yaitu jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA/ sederajat kelas 2).

Bila dibandingkan dengan kabupaten atau kota lain ditingkat nasional peringkat IPM seperti yang terlihat pada tabel 7.4 maka Kota Tangerang Selatan pada tahun 2012 menduduki peringkat ke-70 dari 497 kabupaten dan kota di Indonesia, disusul oleh Kota Cilegon dengan peringkat ke-77 serta Kota Tangerang dengan peringkat ke-83 sedangkan

kabupaten atau kota lain peringkatnya mencapai ratusan. Provinsi Banten peringkat IPM berada pada posisi ke-23 dari 33 provinsi di Indonesia.

Tabel 7.4.

Peringkat Indeks Pembangunan Manusia
dirinci menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten 2012-2013

Provinsi / Kab/Kota	Peringkat IPM	
	2012	2013
(1)	(2)	(3)
BANTEN	23	24
Kabupaten Pandeglang	7	7
Kabupaten Lebak	8	8
Kabupaten Tangerang	4	5
Kabupaten Serang	6	6
Kota Tangerang	3	3
Kota Cilegon	2	2
Kota Serang	5	4
Kota Tangsel	1	1

Sumber: BPS RI 2013- 2013

Pada tahun 2013 peringkat IPM di Kota Tangerang Selatan masih peringkat pertama diantara kabupaten dan kota lain di Provinsi Banten. Perkembangan peringkat IPM dari tahun 2012 ke tahun 2013 relatif tidak ada perubahan kecuali Kabupaten Tangerang dan Kota Serang. Pada tahun 2012 peringkat IPM Kabupaten Tangerang berada pada peringkat 4 (empat) tetapi pada tahun 2013 bergeser ke peringkat 5 (lima) digeser oleh Kota Serang dimana pada tahun 2012 peringkat 5 (lima) naik menjadi peringkat 4 (empat) pada tahun 2013. Penyebab turunnya peringkat IPM di Kabupaten Tangerang bisa dilihat pada tabel 7.3. Diantara penyebab turunnya peringkat IPM di Kabupaten Tangerang adalah hampir disemua indikator

penyusun IPM, kecuali rata-rata lama sekolah yaitu 8,96 sedangkan Kota Cilegon sebesar 8,59. Untuk indikator lainnya Kabupaten Tangerang berada dibawah Kota Serang. AHH Kota Serang sebesar 66,65 sementara Kabupaten Tangerang sebesar 66,33. AMH Kota Serang sebesar 97,35 sedangkan Kabupaten Tangerang sebesar 96,74 demikian juga untuk indeks kemampuan daya beli (PPP), Kota Serang sebesar Rp. 645.470 sedangkan Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 643.040. Bila dilihat secara keseluruhan bahwa IPM kabupaten dan kota di provinsi Banten masuk ke-golongan IPM Menengah Keatas yaitu antara 65 – 80. Bahkan diwilayah kota seperti Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon dan Kota Tangerang hampir mendekati ke-golongan IPM Tinggi. Hal ini membutuhkan kerja keras dari semua pihak, baik dari unsur pemerintah, swasta, perguruan tinggi maupun masyarakat sebagai pelaksana pembangunan sehingga kesejahteraan semakin baik yang tercermin dari IPM yang meningkat.

Penggolongan skor/nilai IPM

Nilai IPM	Keterangan
80 - 100	IPM Tinggi
65 - 80	IPM Menengah Atas
50 - 65	IPM Menengah Bawah
< 50	IPM Rendah

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Tangerang Selatan 2014 memuat perkembangan beberapa indikator makro yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat seperti indikator kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dsb. Publikasi ini juga memuat angka Indeks Pembangunan Manusia Kota Tangerang Selatan berikut analisisnya.

